



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 43);
9. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2022 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 3);
10. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

- Tahun 1945.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 3. Pejabat Negara adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Binjai.
 5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 %.
 6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
 7. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pejabat Negara, PNS dan Calon PNS, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PPPK diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
 - a. pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
 - b. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
 - c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
 - d. fungsional utama;
 - e. fungsional ahli madya;
 - f. fungsional ahli muda;
 - g. fungsional ahli pertama;
 - h. fungsional penyelia;
 - i. fungsional mahir;
 - j. fungsional terampil;
 - k. fungsional pemula;
 - l. pelaksana; dan
 - m. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS:
- sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
 - sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Bagian Kedua

Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 3

- Tunjangan Hari Raya bagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan dan tambahan penghasilan pegawai sebesar 50 % (lima puluh persen).
- Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi Pejabat Negara meliputi:
 - gaji pokok;
 - tunjangan keluarga;
 - tunjangan pangan; dan
 - tunjangan jabatan.
- Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi PNS meliputi:
 - gaji pokok;
 - tunjangan keluarga;
 - tunjangan pangan;
 - tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi:
 - 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - tunjangan keluarga;
 - tunjangan pangan; dan
 - tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi PPPK meliputi:
 - gaji pokok PNS;
 - tunjangan keluarga;
 - tunjangan pangan; dan
 - tunjangan umum.
- Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dapat diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) tunjangan profesi guru atau paling banyak 50% (lima puluh persen) tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.

- (7) Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Ketiga

Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 4

Penerima, Komponen dan besaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis dengan pemberian Tunjangan Hari Raya.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2023.
- (4) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2023.
- (5) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2023.
- (6) Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2023.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah.

BAB IV
PENDANAAN

BAB IV

Pasal 7

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 10 Tahun 2022 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2022 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 6 April 2023

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH



Diundangkan di Binjai
pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2023 NOMOR 6

**LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
KODE KLASIFIKASI ARSIP**

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
000 UMUM				
000.1 KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN				
	000.1.1	Telekomunikasi		
	000.1.2	Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
		000.1.2.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah	
		000.1.2.2	Perjalanan Dinas DPRD	
		000.1.2.3	Perjalanan Dinas Pegawai	
	000.1.3	Perjalanan Dinas Luar Negeri		
		000.1.3.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah	
		000.1.3.2	Perjalanan Dinas DPRD	
		000.1.3.3	Perjalanan Dinas Pegawai	
	000.1.4	Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain: Permintaan dan Penggunaan Ruang Rapat, Gedung, Kendaraan,		
	000.1.5	Rapat pimpinan (antara lain: Notula/Risalah Rapat)		
	000.1.6	Penyediaan Konsumsi		
	000.1.7	Pengurusan Kendaraan Dinas		
		000.1.7.1	Pengurusan surat-surat kendaraan dinas	
		000.1.7.2	Pemeliharaan dan perbaikan	
		000.1.7.3	Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan	
	000.1.8	Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor		
		000.1.8.1	Pertamanan/ Landscape	
		000.1.8.2	Penhijauan	
		000.1.8.3	Perbaikan Gedung	
		000.1.8.4	Perbaikan Peralatan Kantor	
		000.1.8.5	Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma	
		000.1.8.6	Kebersihan Gedung dan Taman	
	000.1.9	Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer		
		000.1.9.1	Perbaikan / Pemeliharaan	
		000.1.9.2	Pemasangan	
	000.1.10	Ketertiban dan Keamanan		
		000.1.10.1	Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawasan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas	
		000.1.10.2	Laporan Ketertiban dan Keamanan	
	000.1.11	Administrasi Pengelolaan Parkir		
	000.1.12	Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya		
000.2 PERLENGKAPAN				
	000.2.1	Inventarisasi dan Penyimpanan		
		000.2.1.1	Data hasil inventarisasi dan penyimpanan	
		000.2.1.2	Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan	
	000.2.2	Pemeliharaan peralatan kantor		
		000.2.2.1	Data hasil pemeliharaan kantor	
		000.2.2.2	Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor	
	000.2.3	Distribusi		
		000.2.3.1	Barang habis pakai	
		000.2.3.2	Barang milik daerah	
	000.2.4	Penghapusan Barang Milik Daerah (antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan		
	000.2.5	Pengelolaan Database Barang Milik Daerah		
000.3 PENGADAAN				
	000.3.1	Rencana Pengadaan Barang dan Jasa (antara lain: Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa,		
	000.3.2	Pengadaan Langsung (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia,		
	000.3.3	Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan		
	000.3.4	Swakelola (antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi)		
	000.3.5	Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan (antara lain: Data base pengguna sistem informasi pengadaan		
	000.3.6	Monitoring dan Evaluasi (antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi)		
000.4 PERPUSTAKAAN				
	000.4.1	Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	000.4.2	Deposit Bahan Pustaka		
		000.4.2.1	Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	
		000.4.2.2	Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman	
		000.4.2.3	Terbitan Internasional dan Regional	
		000.4.2.4	Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	
		000.4.2.5	Bibliografi dan Katalog	
	000.4.3	Koleksi Pustaka		
		000.4.3.1	Pembelian	
		000.4.3.2	Hibah	
		000.4.3.3	Hadiah	
		000.4.3.4	Tukar Menukar	
		000.4.3.5	Implementasi Undang-Undang KCKR	
		000.4.3.6	Terbitan Internal	
		000.4.3.7	Pendistribusian bahan pustaka surplus	

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		000.4.3.8		Inventarisasi koleksi (Buku Induk)
	000.4.4			Pengolahan Bahan Pustaka
	000.4.5			Pangkalan Data Katalog Koleksi
	000.4.6			Layanan Perpustakaan
		000.4.6.1		Keanggotaan
		000.4.6.2		Peminjaman
		000.4.6.3		Pengembangan gemar baca
	000.4.7			Kerjasama Perpustakaan
		000.4.7.1		MoU
		000.4.7.2		Perjanjian kerjasama
		000.4.7.3		Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional
	000.4.8			Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan
		000.4.8.1		Pengembangan situs web
		000.4.8.2		Pengembangan kemas ulang informasi multimedia
		000.4.8.3		Pengembangan program aplikasi perpustakaan
		000.4.8.4		Pengembangan pangkalan data kepustakaan digital
	000.4.9			Pangkalan Data Layanan Perpustakaan
	000.4.10			Konservasi
		000.4.10.1		Perawatan Bahan Perpustakaan
		000.4.10.2		Perbaikan Bahan Perpustakaan
		000.4.10.3		Penjilidan Bahan Perpustakaan
	000.4.11			Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)
	000.4.12			Transformasi Digital
	000.4.13			Kurasi Digital
	000.4.14			Pengembangan Perpustakaan
		000.4.14.1		Perpustakaan Umum
		000.4.14.2		Perpustakaan Khusus
		000.4.14.3		Perpustakaan Sekolah
		000.4.14.4		Perpustakaan Perguruan Tinggi
000.5 KEARSIPAN				
	000.5.1			Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	000.5.2			Pembinaan Kearsipan
		000.5.2.1		Pengembangan Profesi Arsiparis (antara lain: Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan
		000.5.2.2		Bimbingan Konsultasi Arsiparis
		000.5.2.3		Penilaian Arsiparis
		000.5.2.4		Pemilihan Arsiparis Teladan (antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan,
		000.5.2.5		Data Base Arsiparis
		000.5.2.6		Bimbingan Konsultasi Kearsipan
		000.5.2.7		Supervisi dan Evaluasi (antara lain: Perencanaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi
		000.5.2.8		Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi
		000.5.2.9		Fasilitasi Kearsipan (antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana
		000.5.2.10		Lembaga/Unit Kearsipan Teladan (antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan
		000.5.2.11		Jadwal Retensi Arsip (antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari
	000.5.3			Pengelolaan Arsip Dinamis
		000.5.3.1		Penciptaan (antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu
		000.5.3.2		Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain: Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas)
		000.5.3.3		Penataan Arsip Inaktif (antara lain: Daftar Arsip Inaktif, Daftar Arsip Inaktif Tematik)
		000.5.3.4		Penggunaan (antara lain: Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan
		000.5.3.5		Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli,
	000.5.4			Program Arsip Vital (antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital,
	000.5.5			Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi
	000.5.6			Penyusutan Arsip
		000.5.6.1		Pemindahan Arsip (antara lain:Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan)
		000.5.6.2		Pemusnahan Arsip (antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia
		000.5.6.3		Penyerahan Arsip Statis (antara lain: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat
	000.5.7			Alih Media Arsip (antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang alih
	000.5.8			Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis
		000.5.8.1		Data Base Pengelolaan Arsip Aktif
		000.5.8.2		Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif
	000.5.9			Pengelolaan Arsip Statis
		000.5.9.1		Akuisisi (antara lain: Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip , Menetapkan
		000.5.9.2		Penghargaan dan Imbalan
		000.5.9.3		Sejarah Lisan (antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan,
		000.5.9.4		Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis)
		000.5.9.5		Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis,
		000.5.9.6		Preservasi Preventif (antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih
		000.5.9.7		Preservasi Kuratif
		000.5.9.8		Autentikasi Arsip Statis (antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian,
		000.5.9.9		Akses Arsip Statis (antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber)
	000.5.10			Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan,
	000.5.11			Pengelolaan SIKN dan JIKN
	000.5.12			Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana
	000.5.13			Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan
	000.5.14			Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup
	000.5.15			Pengawasan Kearsipan
		000.5.15.1		Pengawasan Kearsipan Internal

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		000.5.15.2		Pengawasan Kearsipan Eksternal
		000.5.15.3		Sanksi
000.6 PERSANDIAN				
	000.6.1	Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	000.6.2	Pengamanan persandian		
		000.6.2.1	Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kriptografi	
		000.6.2.2	Analisis sinyal: teknik sandi dan kriptografi	
		000.6.2.3	Materiil sandi: sistem dan peralatan	
	000.6.3	Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi		
		000.6.3.1	Perencanaan Pengkajian	
		000.6.3.2	Administrasi Pengkajian	
		000.6.3.3	Pelaksanaan	
		000.6.3.4	Pelaporan	
	000.6.4	Pembinaan dan Pengendalian Persandian		
		000.6.4.1	Sumber Daya Manusia (SDM)	
		000.6.4.2	Jaring Komunikasi	
	000.6.5	Layanan Sertifikasi Elektronik		
		000.6.5.1	Perencanaan dan Administrasi	
		000.6.5.2	Pelaksanaan Verifikasi	
		000.6.5.3	Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama	
		000.6.5.4	Penyesuaian Sistem dan Testing	
		000.6.5.5	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna	
		000.6.5.6	Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik	
		000.6.5.7	Pelaporan	
000.7 PERENCANAAN PEMBANGUNAN				
	000.7.1	Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang		
		000.7.1.1	Musrenbang Kab/Kota	
		000.7.1.2	Musrenbang Kecamatan	
		000.7.1.3	Musrenbang Kelurahan	
	000.7.2	Perencanaan Pembangunan Daerah		
		000.7.2.1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang	
		000.7.2.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	
		000.7.2.3	Rencana Anggaran Daerah	
		000.7.2.4	Rencana Pembangunan Tahunan	
		000.7.2.5	Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
		000.7.2.6	Program kerja tahunan	
		000.7.2.7	Penetapan / Kontrak Kinerja	
		000.7.2.8	Laporan Berkala	
		000.7.2.9	Laporan Insidental	
		000.7.2.10	Evaluasi Program	
	000.7.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan		
	000.7.4	Konsultasi Perencanaan Pembangunan		
	000.7.5	Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan		
	000.7.6	Aksi Strategis Daerah		
		000.7.6.1	Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah	
		000.7.6.2	Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah	
		000.7.6.3	Sosisialisasi dengan Perangkat Daerah	
		000.7.6.4	Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah	
		000.7.6.5	Penerapan perencanaan aksi strategi daerah	
	000.7.7	Perencanaan Pendanaan Pembangunan		
		000.7.7.1	Pendanaan Nasional dan Hibah	
		000.7.7.2	Pendanaan Daerah	
		000.7.7.3	Kerjasama Pembangunan Nasional	
		000.7.7.4	Surat Berharga Syariah Negara	
		000.7.7.5	Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru	
000.8 ORGANISASI DAN TATA LAKSANA				
	000.8.1	Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		
		000.8.1.1	Pembentukan	
		000.8.1.2	Penggubahan	
		000.8.1.3	Pembubaran	
	000.8.2	Uraian Jabatan dan Tata Kerja		
		000.8.2.1	Analisa Jabatan	
		000.8.2.2	Analisa Beban Kerja	
	000.8.3	Ketatalaksanaan		
		000.8.3.1	Proses Bisnis	
		000.8.3.2	Standar Pelayanan	
		000.8.3.3	Standar Operasional Prosedur	
		000.8.3.4	Pelayanan Publik	
	000.8.4	Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional		
	000.8.5	Evaluasi Kelembagaan		
	000.8.6	Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi		
		000.8.6.1	Budaya Kerja	
		000.8.6.2	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	
		000.8.6.3	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
000.9 PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN				
	000.9.1	Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah		
	000.9.2	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan (antara lain: Rencana Kerja, Administrasi Penelitian, Pelaksanaan,		
	000.9.3	Sosialisasi dan Desiminasi Hasil penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan		
	000.9.4	Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan		
	000.9.5	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi		
	000.9.6	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi		
	000.9.6.1	Data		
	000.9.6.2	Statistik		
	000.9.6.3	Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian		
	000.9.7	Master proceeding/jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi		
	000.9.8	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)		
	000.9.9	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan		
	000.9.10	Seminar, Lokakarya, Temukarya, Workshop		
100 PEMERINTAHAN				
100.1 OTONOMI DAERAH				
	100.1.1	Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	100.1.2	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)		
	100.1.3	Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi		
	100.1.4	Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)		
	100.1.4.1	Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah		
	100.1.4.2	Administrasi Kepala Daerah dan DPRD		
	100.1.4.3	Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang		
	100.1.4.4	Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)		
	100.1.4.5	Assosiasi Daerah		
	100.1.5	Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)		
	100.1.5.1	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		
	100.1.5.2	Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah		
	100.1.5.3	Pengembangan Kapasitas Daerah		
	100.1.6	LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)		
100.2 PEMERINTAHAN UMUM				
	100.2.1	Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	100.2.2	Dekonsentrasi dan Kerjasama		
	100.2.2.1	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi		
	100.2.2.2	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas		
	100.2.2.3	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama		
	100.2.2.4	Fasilitasi Kecamatan		
	100.2.2.5	Fasilitasi Pelayanan Umum		
	100.2.3	Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	100.2.3.1	Toponimi dan Data Wilayah		
	100.2.3.2	Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara		
	100.2.3.3	Batas Antar Daerah Wilayah		
	100.2.3.4	Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan		
	100.2.3.5	Pemeliharaan Batas Wilayah		
100.3 HUKUM				
	100.3.1	Program Legislasi		
	100.3.1.1	Bahan/Materi Program Legislasi Daerah		
	100.3.1.2	Program Legislasi		
	100.3.2	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (antara lain Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah		
	100.3.3	Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah		
	100.3.3.1	Keputusan/Ketetapan Walikota		
	100.3.3.2	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi		
	100.3.3.3	Keputusan Sekretaris Daerah Kota		
	100.3.4	Instruksi/Surat Edaran		
	100.3.4.1	Instruksi/Surat Edaran Kota		
	100.3.4.2	Instruksi/Surat Edaran Setingkat Eselon II		
	100.3.5	Surat Perintah		
	100.3.5.1	Surat Perintah Walikota		
	100.3.5.2	Surat Perintah Setingkat Eselon II		
	100.3.6	Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis		
	100.3.7	Nota Kesepakatan/Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama		
	100.3.7.1	Dalam Negeri		
	100.3.7.2	Luar Negeri		
	100.3.8	Dokumentasi Hukum (antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan		
	100.3.9	Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum		
	100.3.10	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Pemberian Bantuan Hukum/Konsultasi Hukum (Pidana, Perdata, Tata		
	100.3.11	Kasus/ Sengketa Hukum		
	100.3.11.1	Pidana Kasus/ sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran		
	100.3.11.2	Perdata Kasus/sengketa perdata		
	100.3.11.3	Tata Usaha Negara		
	100.3.11.4	Perburuhan		
	100.3.11.5	Arbitrase		
	100.3.11.6	Sengketa Adat		

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		100.3.12	Perijinan	
		100.3.13	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	
		100.3.13.1	Hak Cipta	
		100.3.13.2	Hak Paten	
		100.3.13.3	Hak Desain Industri	
		100.3.13.4	Hak Rahasia Dagang	
		100.3.13.5	Hak Merk	
		100.3.14	Permohonan HaKI yang ditolak	
200 POLITIK				
200.1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
		200.1.1	Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		200.1.2	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	
		200.1.2.1	Ketahanan Ideologi Negara	
		200.1.2.2	Wawasan Kebangsaan	
		200.1.2.3	Bela Negara	
		200.1.2.4	Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan	
		200.1.2.5	Pembauran dan Kewarganegaraan	
		200.1.3	Kewaspadaan Nasional	
		200.1.3.1	Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan	
		200.1.3.2	Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan	
		200.1.3.3	Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan	
		200.1.3.4	Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial	
		200.1.3.5	Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	
		200.1.4	Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan	
		200.1.4.1	Ketahanan Seni	
		200.1.4.2	Ketahanan Budaya	
		200.1.4.3	Agama dan Kepercayaan	
		200.1.4.4	Organisasi Kemasyarakatan	
		200.1.4.5	Masalah Sosial Kemasyarakatan	
		200.1.4.6	Fasilitasi	
		200.1.4.7	Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat	
		200.1.4.8	Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL	
		200.1.4.9	Evaluasi Aktifitas Ormas : Sanksi Administrasi	
		200.1.4.10	Fasilitasi Sengketa Ormas	
		200.1.4.11	Fasilitasi Ormas	
		200.1.5	Politik Dalam Negeri	
		200.1.5.1	Implementasi Kebijakan Politik	
		200.1.5.2	Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan	
		200.1.5.3	Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik	
		200.1.5.4	Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi	
		200.1.5.5	Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi	
		200.1.5.6	Pemerintah Daerah	
		200.1.5.7	Database Parpol	
		200.1.5.8	Pendidikan Budaya Politik	
		200.1.5.9	Pemilihan Umum	
		200.1.6	Ketahanan Ekonomi	
		200.1.6.1	Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian	
		200.1.6.2	Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter	
		200.1.6.3	Perilaku Perekonomian Masyarakat	
		200.1.6.4	Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi	
200.2 PEMILU				
		200.2.1	Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		200.2.2	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	
		200.2.2.1	Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu	
		200.2.2.2	Daftar Pemilih Sementara (DPS)	
		200.2.2.3	Daftar Pemilih Tambahan	
		200.2.2.4	Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)	
		200.2.2.5	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)	
		200.2.3	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	
		200.2.3.1	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik	
		200.2.3.2	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik	
		200.2.3.3	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan	
		200.2.3.4	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual	
		200.2.4	Penetapan Peserta Pemilu	
		200.2.4.1	Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota	
		200.2.4.2	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR	
		200.2.4.3	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR	
		200.2.4.4	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD	
		200.2.4.5	Peta Daerah Pemilihan	
		200.2.5	Pencalonan Pemilu	
		200.2.5.1	Petunjuk teknis pencalonan	
		200.2.5.2	Surat pencalonan pendaftaran	
		200.2.5.3	Daftar bakal calon	
		200.2.5.4	Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon	
		200.2.5.5	Dokumen verifikasi administrasi	

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		200.2.5.6	Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap	
	200.2.6		Kampanye Pemilu	
		200.2.6.1	Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye	
		200.2.6.2	Nama juru kampanye/pelaksana kampanye	
		200.2.6.3	Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye	
	200.2.7		Dana Kampanye	
		200.2.7.1	Pedoman audit dana kampanye	
		200.2.7.2	Laporan dana kampanye peserta Pemilu	
		200.2.7.3	Laporan hasil audit dana kampanye	
	200.2.8		Pemungutan dan Penghitungan Suara	
		200.2.8.1	Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara	
		200.2.8.2	Master surat suara	
		200.2.8.3	Surat suara yang terpakai	
		200.2.8.4	Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)	
		200.2.8.5	Formulir pemilu di Pemerintah Daerah	
	200.2.9		Penetapan Hasil Pemilu	
	200.2.10		Perselisihan Hasil Pemilu	
		200.2.10.1	Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu	
		200.2.10.2	Jawaban dan kesimpulan termohon	
		200.2.10.3	Salinan Putusan lembaga peradilan	
	200.2.11		Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu	
300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN				
300.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	300.1.1		Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah	
	300.1.2		Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja	
		300.1.2.1	Tata Operasional Polisi Pamong Praja	
		300.1.2.2	Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja	
	300.1.3		Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja	
	300.1.4		Perlindungan Masyarakat	
	300.1.5		Penyidik Pegawai Negeri Sipil	
	300.1.6		Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia	
300.2 PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN				
	300.2.1		Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	300.2.2		Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan	
		300.2.2.1	Rencana dan standarisasi dan pengawakan dan perbekalan	
		300.2.2.2	Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring	
		300.2.2.3	Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan	
		300.2.2.4	Permasyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan	
		300.2.2.5	Perencanaan dan standarisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan	
		300.2.2.6	Registrasi BEACON	
	300.2.3		Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
	300.2.4		Potensi Pencarian dan Pertolongan	
	300.2.5		Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan	
		300.2.5.1	Rencana Pendidikan dan Pelatihan	
		300.2.5.2	Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan	
		300.2.5.3	Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	
		300.2.5.4	Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)	
		300.2.5.5	Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	
	300.2.6		Operasi Pencarian dan Pertolongan	
	300.2.7		Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi	
	300.2.8		Operasi Komunikasi	
		300.2.8.1	Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)	
		300.2.8.2	Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)	
		300.2.8.3	Registrasi BEACON	
	300.2.9		Inventarisasi dan Pemeliharaan	
	300.2.10		Pengembangan Sistem Informasi	
	300.2.11		Penyajian dan Layanan Informasi	
	300.2.12		Pelaporan dan Evaluasi	
		300.2.12.1	Laporan Harian	
		300.2.12.2	Laporan Bulanan	
		300.2.12.3	Laporan Tahunan	
		300.2.12.4	Evaluasi	
400 KESEJAHTERAAN RAKYAT				
400.1 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL				
	400.1.1		Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	400.1.2		Pembangunan Sumber Daya	
		400.1.2.1	Fasilitasi Pendidikan ketrampilan Pengembangan Sumber Daya	
		400.1.2.2	Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya	
		400.1.2.3	Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya	
		400.1.2.4	Fasilitasi Mineral, energi dan lingkungan hidup	
		400.1.2.5	Fasilitasi Teknologi dan inovasi	
		400.1.2.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya	
		400.1.2.7	Pemantauan dan evaluasi	
	400.1.3		Peningkatan Infrastruktur	

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
			400.1.3.1	Fasilitasi Transportasi peningkatan infrastruktur
			400.1.3.2	Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam peningkatan infrastruktur
			400.1.3.3	Fasilitasi Sosial dalam peningkatan infrastruktur
			400.1.3.4	Fasilitasi Ekonomi dalam peningkatan infrastruktur
			400.1.3.5	Fasilitasi energi dalam peningkatan infrastruktur
			400.1.3.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur
			400.1.3.7	Pemantauan dan evaluasi
		400.1.4		Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha
			400.1.4.1	Fasilitasi Invenstasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha
			400.1.4.2	Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha
			400.1.4.3	Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah
			400.1.4.4	Fasilitasi Kemitraan usaha
			400.1.4.5	Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan
			400.1.4.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha
			400.1.4.7	Pemantauan dan evaluasi
			400.1.4.8	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
			400.1.4.9	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
			400.1.4.10	Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal
			400.1.4.11	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
			400.1.4.12	Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
			400.1.4.13	Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal
			400.1.4.14	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
		400.1.5		Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya
			400.1.5.1	Penguatan kapasitas lembaga lokal
			400.1.5.2	Penguatan organisasi masyarakat
			400.1.5.3	Pemberdayaan masyarakat
			400.1.5.4	Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya
			400.1.5.5	Ketenagakerjaan
			400.1.5.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya
			400.1.5.7	Pemantauan dan evaluasi
		400.1.6		Pengembangan Daerah Khusus
			400.1.6.1	Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan
			400.1.6.2	Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana
			400.1.6.3	Fasilitasi pengembangan Daerah Perdesaan
			400.1.6.4	Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar
			400.1.6.5	Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis
			400.1.6.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus
			400.1.6.7	Pemantauan dan evaluasi
400.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
			400.2.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah
			400.2.2	Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum
			400.2.2.1	Data gender
			400.2.2.2	Advokasi dan fasilitasi
			400.2.3	Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)
			400.2.3.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
			400.2.3.2	Data perlindungan perempuan
			400.2.3.3	Advokasi dan fasilitasi
			400.2.3.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan
			400.2.3.5	Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender
			400.2.3.6	Analisis dan penyajian informasi gender
			400.2.3.7	Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu
			400.2.4	Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak
			400.2.4.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
			400.2.4.2	Data perlindungan anak
			400.2.4.3	Advokasi dan fasilitasi
			400.2.4.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak
			400.2.4.5	Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak
			400.2.5	Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur,
			400.2.5.1	Pemenuhan Hak Anak
			400.2.5.2	Data Klaster Hak Anak
			400.2.5.3	Data tumbuh kembang anak
			400.2.5.4	Advokasi dan fasilitasi
			400.2.5.5	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak
			400.2.5.6	Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak
			400.2.6	Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)
			400.2.7	Penghargaan Kabupaten Layak Anak
			400.2.8	Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak
400.3 PENDIDIKAN				
			400.3.1	Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
			400.3.2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal
			400.3.2.1	Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)
			400.3.2.2	Pelatihan Sosial
			400.3.2.3	Peringatan Hari anak
			400.3.2.4	Block Grant
		400.3.3		Pendidikan Masyarakat

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
			400.3.3.1	Penyelenggaraan Program
			400.3.3.2	Penilaian dan pemberian bantuan sosial
			400.3.3.3	Pembinaan Program
			400.3.3.4	Lomba/Pemberian Penghargaan
			400.3.3.5	Pameran
			400.3.3.6	Rakor
			400.3.3.7	Sosialisasi
			400.3.3.8	Sertifikasi dan Akreditasi
		400.3.4		Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik
		400.3.5		Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama
			400.3.5.1	Kurikulum, bahan ajar
			400.3.5.2	Block Grant
			400.3.5.3	Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,
			400.3.5.4	Lomba, penghargaan, penganugerahan
			400.3.5.5	Bantuan operasional sekolah (BOS)
			400.3.5.6	Bantuan Siswa Miskin
		400.3.6		Pendidikan khusus/Layanan Khusus
			400.3.6.1	Kurikulum, Bahan ajar, alat bantu pembelajaran
			400.3.6.2	Block Grant
			400.3.6.3	Lomba, festival
			400.3.6.4	Sosialisasi, bimtek
			400.3.6.5	Pendataan
			400.3.6.6	Kelembagaan
		400.3.7		Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik
			400.3.7.1	Pendataan dan Pemeetaan
			400.3.7.2	Uji Kompetensi Guru
			400.3.7.3	Sertifikasi Guru
			400.3.7.4	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
			400.3.7.5	Peningkatan kesejahteraan guru
			400.3.7.6	Sosialisasi, bimtek
			400.3.7.7	Block Grant
		400.3.8		Sekolah Menengah Atas
			400.3.8.1	Kurikulum
			400.3.8.2	Bahan Ajar
			400.3.8.3	Pelatihan
			400.3.8.4	Block grant
			400.3.8.5	Bimbingan teknis/sosialisasi
			400.3.8.6	Lomba , Sayembara, festival
			400.3.8.7	Bantuan operasional Sekolah (BOS)
			400.3.8.8	Bantuan siswa miskin
		400.3.9		Pendidikan Khusus-Layanan Khusus
			400.3.9.1	Bahan ajar
			400.3.9.2	Petunjuk Teknis
			400.3.9.3	Block grant
			400.3.9.4	Sosialisasi, bimtek
			400.3.9.5	Lomba, sayembara, jambore, festival
			400.3.9.6	Kurikulum/bahan pembelajaran
			400.3.9.7	Alat bantu pembelajaran
			400.3.9.8	Pendataan
			400.3.9.9	Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi
		400.3.10		Pendidik dan Tenaga Pendidik
			400.3.10.1	Pendataan dan Pemetaan
			400.3.10.2	Uji Kompetensi Guru
			400.3.10.3	Setifikasi Guru
			400.3.10.4	Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah
			400.3.10.5	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
			400.3.10.6	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik
			400.3.10.7	Block grant
			400.3.10.8	Bimbingan teknis/sosialisasi
		400.3.11		Penilaian Pendidikan
			400.3.11.1	Penilaian Akademik
			400.3.11.2	Penilaian Non Akademik
			400.3.11.3	Analisis dan Sistem Informasi Penilaian
		400.3.12		Data dan Statistik Pendidikan
			400.3.12.1	Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan
			400.3.12.2	Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran
		400.3.13		Prasarana dan Sarana Pendidikan
			400.3.13.1	Prasarana Pendidikan
			400.3.13.2	Sarana Pendidikan
			400.3.13.3	Monitoring dan Evaluasi
400.4 KEOLAHRAGAAN				
			400.4.1	Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
			400.4.2	Pengelolaan Olahraga Pendidikan
			400.4.2.1	Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah
			400.4.2.2	Olahraga Pendidikan Tinggi
			400.4.2.3	Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		400.4.3		Pengelolaan Olahraga Rekreasi
			400.4.3.1	Olahraga Massal
			400.4.3.2	Olahraga Tradisional
			400.4.3.3	Olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata
		400.4.4		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga
			400.4.4.1	Olahraga Pendidikan
			400.4.4.2	Olahraga Rekreasi
			400.4.4.3	Olahraga Prestasi
			400.4.4.4	Sekolah Khusus Olahraga
		400.4.5		Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus
			400.4.5.1	Olahraga Tradisional
			400.4.5.2	Layanan Khusus
		400.4.6		Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
			400.4.6.1	Kemitraan Keolahragaan
			400.4.6.2	Penghargaan Olahraga
		400.4.7		Pembibitan dan IPTEK Olahraga
			400.4.7.1	Pembibitan Olahraga
			400.4.7.2	Kompetisi
			400.4.7.3	IPTEK Olahraga
		400.4.8		Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan
			400.4.8.1	Tenaga Keolahragaan
			400.4.8.2	Organisasi Keolahragaan
		400.4.9		Industri dan Promosi Olahraga
			400.4.9.1	Industri Olahraga
			400.4.9.2	Promosi Olahraga
		400.4.10		Olahraga Prestasi
			400.4.10.1	Daerah
			400.4.10.2	Nasional
			400.4.10.3	Internasional
		400.4.11		Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga
			400.4.11.1	Standardisasi Keolahragaan
			400.4.11.2	Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan
			400.4.11.3	Infrastruktur Olahraga
				400.5 KEPEMUDAAN
		400.5.1		Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
		400.5.2		Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda
			400.5.2.1	Penelusuran (Duta Kepemudaan)
			400.5.2.2	Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)
			400.5.2.3	Pengembangan
		400.5.3		Peningkatan Wawasan Pemuda
			400.5.3.1	Wawasan Kebangsaan
			400.5.3.2	Wawasan Lingkungan
			400.5.3.3	Wawasan Sosial dan Hukum
		400.5.4		Peningkatan Kapasitas Pemuda
			400.5.4.1	Kapasitas Iman dan Taqwa
			400.5.4.2	Kapasitas IPTEK
			400.5.4.3	Pemanfaatan IPTEK
		400.5.5		Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)
			400.5.5.1	Pengkajian
			400.5.5.2	Pengembangan
			400.5.5.3	Pendayagunaan (fasilitasi)
		400.5.6		Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
			400.5.6.1	Kepemimpinan : Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan
			400.5.6.2	Kepeloporan Pemuda : Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan
		400.5.7		Kewirausahaan
			400.5.7.1	Kelembagaan
			400.5.7.2	Pengaderan
			400.5.7.3	Perintisan
		400.5.8		Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan
			400.5.8.1	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan : Kelembagaan dan Sumberdaya
			400.5.8.2	Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan : Kelembagaan dan Sumberdaya
			400.5.8.3	Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya
			400.5.8.4	Pengawasan Kepramukaan : Kelembagaan, Program dan Sumberdaya
		400.5.9		Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda
			400.5.9.1	Standardisasi
			400.5.9.2	Infrastruktur Pemuda
		400.5.10		Kemitraan dan Penghargaan Pemuda
			400.5.10.1	Kemitraan
			400.5.10.2	Penghargaan Pemuda
				400.6 KEBUDAYAAN
		400.6.1		Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
		400.6.2		Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
			400.6.2.1	Registrasi Nasional
			400.6.2.2	Pelindungan
			400.6.2.3	Pengembangan dan Pemanfaatan

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
			400.6.2.4	Eksplorasi dan Dokumentasi
	400.6.3			Pembinaan Kesenian dan Perfilman
			400.6.3.1	Pembinaan Seni Pertunjukan
			400.6.3.2	Pembinaan Seni Rupa
			400.6.3.3	Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film
			400.6.3.4	Dokumentasi dan Publikasi
	400.6.4			Sejarah dan Nilai Budaya
			400.6.4.1	Sejarah
			400.6.4.2	Pemetaan nilai
			400.6.4.3	Verifikasi dan Perumusan Nilai
			400.6.4.4	Dokumentasi dan Publikasi
			400.6.4.5	Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah
			400.6.4.6	Publikasi sejarah dan nilai sejarah
	400.6.5			Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya
			400.6.5.1	Internalisasi nilai budaya
			400.6.5.2	Kekayaan budaya
			400.6.5.3	Warisan budaya nasional dan dunia
			400.6.5.4	Diplomasi budaya
400.7 KESEHATAN				
	400.7.1			Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.7.2			Upaya Kesehatan Dasar
			400.7.2.1	Pelayanan kedokteran keluarga
			400.7.2.2	Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer
			400.7.2.3	Pelaksanaan kesehatan primer
			400.7.2.4	Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas
			400.7.2.5	Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit
			400.7.2.6	ICD 10, Destistry & Stomatology
			400.7.2.7	Infeksi menular lewat transfusi darah
			400.7.2.8	Penyakit mulut di tingkat primer
			400.7.2.9	Pembiayaan darah
			400.7.2.10	Penggunaan darah rasional
			400.7.2.11	Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah
			400.7.2.12	Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan
			400.7.2.13	Akreditasi puskesmas
			400.7.2.14	Puskesmas berprestasi
	400.7.3			Upaya Kesehatan Rujukan
			400.7.3.1	Pelayanan kesehatan rujukan
			400.7.3.2	Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)
			400.7.3.3	Pelayanan rumah sakit privat
			400.7.3.4	Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
			400.7.3.5	Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan
			400.7.3.6	Pelayanan pasien jaminan kesehatan
			400.7.3.7	Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa
			400.7.3.8	Badan pengawas rumah sakit
			400.7.3.9	Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)
			400.7.3.10	Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya
	400.7.4			Keperawatan dan keteknisian medik
			400.7.4.1	Pelayanan Keperawatan Dasar
			400.7.4.2	Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit
			400.7.4.3	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum
			400.7.4.4	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus
			400.7.4.5	Bina pelayanan kebidanan
	400.7.5			Penunjang medik dan sarana kesehatan
			400.7.5.1	Mikrobiologi dan imunologi
			400.7.5.2	Patologi dan toksilogi
			400.7.5.3	Radiologi
			400.7.5.4	Perizinan dan sertifikasi
			400.7.5.5	Sarana dan prasarana kesehatan
			400.7.5.6	Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan
			400.7.5.7	Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan
	400.7.6			Kesehatan Jiwa
			400.7.6.1	Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan
			400.7.6.2	Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan
			400.7.6.3	Etikolegal dan asesmen
			400.7.6.4	Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya
			400.7.6.5	Etikolegal dan asesmen
			400.7.6.6	Kesehatan jiwa kelompok beresiko
	400.7.7			Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra
			400.7.7.1	Surveilans dan respon kejadian luar biasa
			400.7.7.2	Imunisasi
			400.7.7.3	Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan
			400.7.7.4	Kesehatan matra
	400.7.8			Pengendalian penyakit menular langsung
			400.7.8.1	Pengendalian tuberkulosis
			400.7.8.2	Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual
			400.7.8.3	Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
			400.7.8.4	Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan
			400.7.8.5	Pengendalian kusta dan frambusia
		400.7.9		Pengendalian penyakit bersumber binatang
			400.7.9.1	Pengendalian malaria
			400.7.9.2	Pengendalian arbovirosis
			400.7.9.3	Pengendalian zoonosis
			400.7.9.4	Pengendalian filariasis dan kecacingan
		400.7.10		Pengendalian penyakit tidak menular
			400.7.10.1	Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah
			400.7.10.2	Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik
			400.7.10.3	Penyakit kanker
			400.7.10.4	Penyakit kronis dan generatif
			400.7.10.5	Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan
		400.7.11		Penyehatan lingkungan
			400.7.11.1	Penyehatan air dan sanitasi dasar
			400.7.11.2	Pemukiman dan tempat umum
			400.7.11.3	Kawasan dan sanitasi darurat
			400.7.11.4	Higien sanitasi pangan
			400.7.11.5	Pengamanan limbah, udara, radiasi
		400.7.12		Pengembangan teknologi laboratorium dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian
		400.7.13		Gizi
			400.7.13.1	Gizi makro
			400.7.13.2	Gizi mikro
			400.7.13.3	Gizi klinik dan diatetik
			400.7.13.4	Konsumsi makanan dan jasa makanan
			400.7.13.5	Kewaspadaan gizi
		400.7.14		Kesehatan ibu
			400.7.14.1	Kesehatan ibu hamil
			400.7.14.2	Kesehatan ibu bersalin dan nifas
			400.7.14.3	Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi
			400.7.14.4	Keluarga berencana
			400.7.14.5	Perlindungan kesehatan reproduksi
		400.7.15		Kesehatan anak
			400.7.15.1	Kelangsungan hidup bayi
			400.7.15.2	Kelangsungan anak balita dan pra sekolah
			400.7.15.3	Kewaspadaan penanganan balita beresiko
			400.7.15.4	Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja
			400.7.15.5	Perlindungan kesehatan anak
		400.7.16		Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer
			400.7.16.1	Kesehatan tradisional keterampilan
			400.7.16.2	Kesehatan tradisional ramuan
			400.7.16.3	Kesehatan alternatif dan komplementer
			400.7.16.4	Penapisan dan kemitraan
		400.7.17		Kesehatan kerja dan Olah raga
			400.7.17.1	Pelayanan kesehatan kerja
			400.7.17.2	Kapasitas kerja
			400.7.17.3	Lingkungan kerja
			400.7.17.4	Kemitraan kesehatan kerja
			400.7.17.5	Kesehatan perkotaan
			400.7.17.6	Kesehatan olahraga
		400.7.18		Obat Publk dan perbekalan kesehatan
			400.7.18.1	Harga obat publik
			400.7.18.2	Pengadaan obat
			400.7.18.3	Perbekalan kesehatan
		400.7.19		Produksi dan distribusi alat kesehatan
			400.7.19.1	Alat kesehatan
			400.7.19.2	Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat
			400.7.19.3	Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga
		400.7.20		Kefarmasian
			400.7.20.1	Pelayanan kefarmasian
			400.7.20.2	Farmasi klinis
			400.7.20.3	Farmasi Komunitas
			400.7.20.4	Penggunaan obat rasional
		400.7.21		Produksi dan distribusi kefarmasian
			400.7.21.1	Obat tradisional
			400.7.21.2	Kosmetik dan makanan
			400.7.21.3	Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus
			400.7.21.4	Kemandirian obat dan bahan baku obat
		400.7.22		Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan
			400.7.22.1	Surat keterangan
			400.7.22.2	Sertifikasi dan perijinan
		400.7.23		Penanggulangan Krisis Kesehatan
			400.7.23.1	Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
			400.7.23.2	Tanggap darurat dan pemulihan
			400.7.23.3	Pemantauan dan informasi
			400.7.23.4	Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan
			400.7.23.5	Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		400.7.24	Pengembangan dan Jaminan Kesehatan	
		400.7.24.1	Tersedianya data NHA setiap tahun	
		400.7.24.2	Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN	
		400.7.25	Intelegensia Kesehatan	
		400.7.25.1	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan	
		400.7.25.2	Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan	
		400.7.26	Kesehatan Haji	
		400.7.26.1	Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji	
		400.7.26.2	Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji	
		400.7.27	Promosi Kesehatan	
		400.7.27.1	Sarana Promosi Kesehatan	
		400.7.27.2	Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran	
		400.7.27.3	Pengembangan pesan promosi kesehatan	
		400.7.27.4	Hari kesehatan	
		400.7.28	Data dan Informasi	
		400.7.28.1	Statistik kesehatan	
		400.7.28.2	Analisis dan diseminasi informasi	
		400.7.28.3	Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan	
		400.7.29	Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen	
		400.7.29.1	Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik	
		400.7.29.2	Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen	
		400.7.29.3	Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen	
		400.7.29.4	Obat Asli Indonesia	
		400.7.30	Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	
		400.7.30.1	Penilaian keamanan pangan	
		400.7.30.2	Standardisasi produk pangan	
		400.7.30.3	Inspeksi dan sertifikasi produk pangan	
		400.7.30.4	Surveilans dan penyuluhan keamanan pangan	
		400.7.30.5	Pengawasan produk dan bahan berbahaya	
		400.7.31	Rekam Medis	
400.8 AGAMA DAN KEPERCAYAAN				
		400.8.1	Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		400.8.2	Fasilitasi	
		400.8.2.1	Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota	
		400.8.2.2	Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan	
		400.8.2.3	Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayaan	
		400.8.2.4	Kasus Keagamaan	
		400.8.2.5	Kasus Aliran Keagamaan	
		400.8.3	Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME	
		400.8.3.1	Kelembagaan dan kepercayaan	
		400.8.3.2	Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama	
		400.8.3.3	Komunitas Kepercayaan	
		400.8.3.4	Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional	
		400.8.3.5	Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial	
400.9 SOSIAL				
		400.9.1	Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		400.9.2	Kesejahteraan Sosial Anak	
		400.9.2.1	Kesejahteraan sosial anak balita	
		400.9.2.2	Kesejahteraan sosial anak terlantar	
		400.9.2.3	Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum	
		400.9.2.4	Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan	
		400.9.2.5	Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus	
		400.9.3	Rehabilitasi Sosial	
		400.9.3.1	Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra	
		400.9.3.2	Kelembagaan dan advokasi sosial	
		400.9.3.3	Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial	
		400.9.4	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	
		400.9.4.1	Gelandangan, pengemis dan pemulung	
		400.9.4.2	Tuna susila dan korban trafficking perempuan	
		400.9.4.3	Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi	
		400.9.4.4	Pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS dan kelompok minoritas	
		400.9.5	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	
		400.9.6	Pelayanan sosial lanjut usia	
		400.9.6.1	Pelayanan sosial dalam dan luar panti	
		400.9.6.2	Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga	
		400.9.6.3	Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan	
		400.9.7	Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial	
		400.9.8	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	
		400.9.9	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	
		400.9.9.1	Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya	
		400.9.9.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial	
		400.9.9.3	Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial	
		400.9.9.4	Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah	
		400.9.10	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	
		400.9.10.1	Kesiapsiagaan dan mitigasi	

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		400.9.10.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial	
		400.9.10.3	Pemulihan sosial dan penguatan sosial	
		400.9.10.4	Kerjasama	
	400.9.11	Jaminan Sosial		
		400.9.11.1	Seleksi dan verifikasi	
		400.9.11.2	Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi	
		400.9.11.3	Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran	
		400.9.11.4	Kerjasama	
	400.9.12	Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial		
		400.9.12.1	Ketahanan keluarga	
		400.9.12.2	Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan	
		400.9.12.3	Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial	
		400.9.12.4	Kemitraan dunia usaha	
		400.9.12.5	Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas	
	400.9.13	Pemberdayaan komunitas adat terpencil		
		400.9.13.1	Persiapan pemberdayaan	
		400.9.13.2	Pemberdayaan sumber daya manusia	
		400.9.13.3	Penggalian dan pengembangan potensi	
		400.9.13.4	Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil	
		400.9.13.5	Kerjasama kelembagaan	
	400.9.14	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan		
		400.9.14.1	Identifikasi dan analisis	
		400.9.14.2	Pengembangan kapasitas	
		400.9.14.3	Penataan sosial lingkungan kumuh	
		400.9.14.4	Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas	
		400.9.14.5	Bantuan Langsung	
		400.9.14.6	Kerjasama Kelembagaan	
	400.9.15	Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial		
		400.9.15.1	Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan	
		400.9.15.2	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan	
		400.9.15.3	Pengembangan kesetiakawanan sosial	
		400.9.15.4	Pengelolaan taman makam pahlawan	
400.1 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN				
	400.10.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	400.10.2	Pemerintahan Kelurahan		
		400.10.2.1	Fasilitasi Pengembangan Kelurahan	
		400.10.2.2	Administrasi Pemerintahan Kelurahan	
		400.10.2.3	Fasilitasi Permusyawaratan Kelurahan	
		400.10.2.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Kelurahan	
		400.10.2.5	Pengembangan Kapasitas Kelurahan	
	400.10.3	Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
		400.10.3.1	Lembaga Masyarakat	
		400.10.3.2	Pembangunan Partisipatif	
		400.10.3.3	Pendataan Potensi Masyarakat	
		400.10.3.4	Pengembangan Kawasan Kelurahan	
		400.10.3.5	Pelatihan Masyarakat	
	400.10.4	Pemberdayaa Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
		400.10.4.1	Budaya Nusantara	
		400.10.4.2	Pemberdayaan Perempuan	
		400.10.4.3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	
		400.10.4.4	Kesejahteraan Sosial	
		400.10.4.5	Tenaga Kerja Kelurahan	
	400.10.5	Usaha Ekonomi Masyarakat		
		400.10.5.1	Usaha Pertanian dan Pangan	
		400.10.5.2	Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam	
		400.10.5.3	Produksi dan Pemasaran	
		400.10.5.4	Usaha Ekonomi dan Keluarga	
		400.10.5.5	Ekonomi Kelurahan dan Masyarakat Tertinggal	
	400.10.6	Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan		
		400.10.6.1	Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Kelurahan	
		400.10.6.2	Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Kelurahan	
		400.10.6.3	Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kelurahan	
		400.10.6.4	Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Kelurahan	
		400.10.6.5	Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Kelurahan	
	400.10.7	Badan Usaha Milik Kelurahan		
400.1 PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN				
	400.11.1	Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	400.11.2	Pertamanan		
		400.11.2.1	Perencanaan Pertamanan	
		400.11.2.2	Taman Kota	
		400.11.2.3	Tata Hias dan Ornamen Kota	
	400.11.3	Pemakaman		
		400.11.3.1	Perencanaan Pemakaman	
		400.11.3.2	Pemakaman	
		400.11.3.3	Pelayanan Pemakaman	

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		400.11.4	Jalur Hijau	
			400.11.4.1	Perencanaan Jalur Hijau
			400.11.4.2	Jalur Hijau Jalan
			400.11.4.3	Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air
		400.11.5	Peran Serta Masyarakat	
		400.11.6	Pengawasan dan Penindakan	
		400.11.7	Pengelolaan Data	
		400.11.8	Evaluasi dan Pelaporan	
400.1 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				
		400.12.1	Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.	
		400.12.2	Pendaftaran Penduduk	
			400.12.2.1	Identitas Penduduk
			400.12.2.2	Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI
			400.12.2.3	Pindah Datang Penduduk Antar Negara
			400.12.2.4	Pendataan Penduduk Rentan
			400.12.2.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
		400.12.3	Pencatatan Sipil	
			400.12.3.1	Kelahiran dan Kematian
			400.12.3.2	Perkawinan dan Perceraian
			400.12.3.3	Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan
			400.12.3.4	Pencatatan Kewarganegaraan
			400.12.3.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
		400.12.4	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			400.12.4.1	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
			400.12.4.2	Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan
			400.12.4.3	Pengelolaan data Administrasi Kependudukan
			400.12.4.4	Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan
			400.12.4.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
		400.12.5	Pengembangan Kebijakan Kependudukan	
			400.12.5.1	Kuantitas Penduduk
			400.12.5.2	Kualitas Penduduk
			400.12.5.3	Mobilitas Penduduk
			400.12.5.4	Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk
			400.12.5.5	Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi
		400.12.6	Penyerasian Kependudukan	
			400.12.6.1	Indikator Kependudukan
			400.12.6.2	Proyeksi Penduduk
			400.12.6.3	Perencanaan Kependudukan
			400.12.6.4	Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah
			400.12.6.5	Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah
400.1 KELUARGA BERENCANA				
		400.13.1	Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		400.13.2	Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk	
			400.13.2.1	Pengumpulan dan pengolahan data
			400.13.2.2	Evaluasi dan pelaporan
		400.13.3	Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk	
			400.13.3.1	Penyiapan fasilitas
			400.13.3.2	Evaluasi dan pelaporan
		400.13.4	Profil dan proyeksi penduduk	
			400.13.4.1	Data profil dan proyeksi penduduk
			400.13.4.2	Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk
		400.13.5	Penetapan parameter pengendalian penduduk	
			400.13.5.1	Penetapan sasaran parameter
			400.13.5.2	Evaluasi sasaran parameter
		400.13.6	Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk	
			400.13.6.1	Pemanfaatan profil dan proyeksi
			400.13.6.2	Pemanfaatan parameter
		400.13.7	Pengembangan Sistem	
			400.13.7.1	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal
			400.13.7.2	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
		400.13.8	Pengembangan Materi	
			400.13.8.1	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal
			400.13.8.2	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
		400.13.9	Monitoring dan Evaluasi	
			400.13.9.1	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal
			400.13.9.2	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
		400.13.10	Analisis Sosial	
		400.13.11	Analisis Ekonomi	
		400.13.12	Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan	
		400.13.13	Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	
		400.13.14	Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah	
		400.13.15	Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana	
		400.13.16	Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah	

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
			400.13.16.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
			400.13.16.2	Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
		400.13.17		Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta
		400.13.18		Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta
		400.13.19		Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta
			400.13.19.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta
			400.13.19.2	Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta
		400.13.20		Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan
			400.13.20.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan
		400.13.21		Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
			400.13.21.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
			400.13.21.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
		400.13.22		Kesertaan keluarga berencana pria
			400.13.22.1	Peningkatan akses keluarga berencana pria
			400.13.22.2	Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria
		400.13.23		Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak
		400.13.24		Pencegahan PMS dan HIV/AIDS
		400.13.25		Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas
		400.13.26		Pelebagaan bina keluarga Balita dan anak
			400.13.26.1	Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak
			400.13.26.2	Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak
		400.13.27		Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak
			400.13.27.1	Monitoring bina keluarga Balita dan anak
			400.13.27.2	Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak
		400.13.28		Pelebagaan bina ketahanan remaja
			400.13.28.1	Pelebagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan
			400.13.28.2	Pelebagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat
		400.13.29		Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja
			400.13.29.1	Monitoring bina ketahanan remaja
			400.13.29.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja
		400.13.30		Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
			400.13.30.1	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia
			400.13.30.2	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan
		400.13.31		Pelebagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
			400.13.31.1	Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
			400.13.31.2	Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
		400.13.32		Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
			400.13.32.1	Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
			400.13.32.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
		400.13.33		Pengembangan program usaha ekonomi keluarga
		400.13.34		Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga
		400.13.35		Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga
			400.13.35.1	Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga
			400.13.35.2	Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga
		400.13.36		Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga
		400.13.37		Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera
		400.13.38		Pelebagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
			400.13.38.1	Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
			400.13.38.2	Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
		400.13.39		Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
			400.13.39.1	Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
			400.13.39.2	Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
		400.13.40		Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
			400.13.40.1	Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
			400.13.40.2	Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
		400.13.41		Advokasi dan pencitraan
		400.13.42		Komunikasi, Informasi dan Edukasi
			400.13.42.1	Promosi
			400.13.42.2	Sarana produksi media komunikasi
			400.13.42.3	Produk media komunikasi
		400.13.43		Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi
		400.13.44		Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
			400.13.44.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
			400.13.44.2	Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
		400.13.45		Hubungan dengan lembaga nonpemerintah
			400.13.45.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
			400.13.45.2	Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
		400.13.46		Tenaga Lini Lapangan
			400.13.46.1	Pengembangan tenaga lini lapangan

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
			400.13.46.2	Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan
		400.13.47		Institusi Masyarakat Kelurahan
			400.13.47.1	Pengembangan institusi masyarakat Kelurahan
			400.13.47.2	Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat Kelurahan
		400.13.48		Mekanisme Operasional lini lapangan
			400.13.48.1	Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan
			400.13.48.2	Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan
		400.13.49		Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan
			400.13.49.1	Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan
			400.13.49.2	Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan
		400.13.50		Pengumpulan dan pengolahan data
		400.13.51		Analisis dan evaluasi
			400.13.51.1	Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk
			400.13.51.2	Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera
		400.13.52		Sistem aplikasi dan bank data
			400.13.52.1	Pengembangan sistem aplikasi
			400.13.52.2	Pengelolaan bank data
		400.13.53		Infrastruktur teknologi informasi
			400.13.53.1	Pengembangan infrastruktur teknologi informasi
			400.13.53.2	Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi
		400.13.54		Dokumentasi dan penyebaran informasi
			400.13.54.1	Dokumentasi dan perpustakaan
			400.13.54.2	Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi
400.1 HUBUNGAN MASYARAKAT				
		400.14.1		Keprotokolan
			400.14.1.1	Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara
			400.14.1.2	Buku tamu Keprotokolan
			400.14.1.3	Agenda kegiatan pimpinan daerah
			400.14.1.4	Kunjungan dinas dalam dan luar negeri
		400.14.2		Daftar nama/alamat kantor /pejabat
		400.14.3		Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-
		400.14.4		Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan
			400.14.4.1	Kliping koran
			400.14.4.2	Brosur/Leaflet/poster/plakat
			400.14.4.3	Pengumuman/pemberitaan
		400.14.5		Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah
			400.14.5.1	Hubungan antar lembaga pemerintah
			400.14.5.2	Hubungan dengan organisasi sosial / LSM
			400.14.5.3	Hubungan dengan perusahaan
			400.14.5.4	Hubungan dengan Perguruan Tinggi/sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda
			400.14.5.5	Forum Kehumasan
			400.14.5.6	Hubungan dengan Media Massa
		400.14.6		Dengar pendapat/hearing DPRD
		400.14.7		Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten
		400.14.8		Penerbitan Majalah, buletin, koran dan jurnal
		400.14.9		Publikasi melalui media cetak maupun elektronik
		400.14.10		Pameran/sayemara/lomba/festival, pembuatan spanduk dan iklan
		400.14.11		Penghargaan/tanda kenang-kenangan
		400.14.12		Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf
500 PEREKONOMIAN				
500.1 KETAHANAN PANGAN				
		500.1.1		Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah
		500.1.2		Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
			500.1.2.1	Ketersediaan Pangan
			500.1.2.2	Akses Pangan
			500.1.2.3	Kerawanan Pangan
		500.1.3		Distribusi dan Cadangan Pangan
			500.1.3.1	Distribusi Pangan
			500.1.3.2	Harga Pangan
			500.1.3.3	Cadangan Pangan
		500.1.4		Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan
			500.1.4.1	Konsumsi Pangan
			500.1.4.2	Penganekaragaman Pangan
			500.1.4.3	Keamanan Pangan Segar
		500.1.5		Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan
			500.1.5.1	Dewan Ketahanan Pangan
			500.1.5.2	Penghargaan Ketahanan Pangan
		500.1.6		Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)
		500.1.7		Bimbingan Teknis
		500.1.8		Evaluasi
500.2 PERDAGANGAN				
		500.2.1		Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		500.2.2		Perdagangan Dalam Negeri
			500.2.2.1	Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha
			500.2.2.2	Bisa Usaha Jasa Perdagangan
			500.2.2.3	Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan
			500.2.2.4	Informasi Perusahaan
			500.2.2.5	Pelaku Pasar
			500.2.2.6	Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah
			500.2.2.7	Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah
			500.2.2.8	Pengembangan Produk Lokal
			500.2.2.9	Pencitraan Produk Dalam Negeri
			500.2.2.10	Pengembangan Sarana Distribusi
			500.2.2.11	Pengelolaan Sarana Distribusi
			500.2.2.12	Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik
			500.2.2.13	Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik
			500.2.2.14	Informasi Pasar
			500.2.2.15	Informasi Hasil Industri
			500.2.2.16	Barang Strategis
			500.2.2.17	Bahan Pokok Agro
		500.2.3		Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
			500.2.3.1	Kelembagaan dan informasi standar
			500.2.3.2	Kerjasama Standarisasi
			500.2.3.3	Perumusan dan penerapan standar
			500.2.3.4	Tata usaha
			500.2.3.5	Kerjasama, informasi, dan publikasi
			500.2.3.6	Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen
			500.2.3.7	Bimbingan konsumen dan pelaku usaha
			500.2.3.8	Fasilitas kelembagaan
			500.2.3.9	Produk pertambangan dan aneka industri
			500.2.3.10	Produk pertanian, kimia dan kehutanan
			500.2.3.11	Jasa
			500.2.3.12	Kerjasama
			500.2.3.13	Sarana dan Kerjasama
			500.2.3.14	Kelembagaan dan dan penilaian
			500.2.3.15	UTTP dan Standar Ukuran
			500.2.3.16	Pengawasan
			500.2.3.17	Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran
			500.2.3.18	Balai Pengujian UTTP
		500.2.4		Perdagangan Berjangka Komoditi
			500.2.4.1	Pengkajian pasar
			500.2.4.2	Pengawasan Transaksi
			500.2.4.3	Pengawasan Keuangan dan Audit
			500.2.4.4	Pengkajian pasar
			500.2.4.5	Pengembangan Pasar
			500.2.4.6	Sistem informasi
			500.2.4.7	Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang
			500.2.4.8	Pengawasan pasar lelang
			500.2.4.9	Pengawasan sistem gudang
		500.2.5		Bimbingan Teknis
		500.2.6		Evaluasi
500.3 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				
		500.3.1		Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
		500.3.2		Kelembagaan Koperasi dan UKM
			500.3.2.1	Organisasi dan Badan Hukum Koperasi
			500.3.2.2	Tata Laksana Koperasi dan UKM
			500.3.2.3	Keanggotaan Koperasi
			500.3.2.4	Pengendalian dan Akuntabilitas
		500.3.3		Produksi
			500.3.3.1	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
			500.3.3.2	Kehutanan dan Perkebunan
			500.3.3.3	Perikanan dan Peternakan
			500.3.3.4	Industri Kerajinan dan Pertambangan
			500.3.3.5	Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha
		500.3.4		Pembiayaan
			500.3.4.1	Program Pendanaan
			500.3.4.2	Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam
			500.3.4.3	Urusan Permodalan
			500.3.4.4	Asuransi dan Jasa Keuangan
			500.3.4.5	Pembiayaan dan Penjaminan Kredit
			500.3.4.6	Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)
		500.3.5		Pemasaran dan Jaringan Usaha
			500.3.5.1	Perdagangan Dalam Negeri
			500.3.5.2	Ekspor dan Impor
			500.3.5.3	Sarana dan Prasarana Pemasaran
			500.3.5.4	Kemitraan dan Jaringan Usaha
			500.3.5.5	Informasi dan Publikasi Bisnis
			500.3.5.6	Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		500.3.6	Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		500.3.6.1	Pengembangan Kewirausahaan	
		500.3.6.2	Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM	
		500.3.6.3	Peran Serta Masyarakat	
		500.3.6.4	Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM	
		500.3.6.5	Advokasi	
		500.3.7	Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha	
		500.3.7.1	Produktifitas dan Mutu	
		500.3.7.2	Restrukturisasi Usaha	
		500.3.7.3	Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)	
		500.3.7.4	Fasilitasi Investasi UKMK	
		500.3.7.5	Pengembangan Sarana Bisnis	
		500.3.8	Pengkajian Sumber Daya UKMK	
		500.3.8.1	Penelitian Koperasi	
		500.3.8.2	Penelitian UKM	
		500.3.8.3	Penelitian Sumber Daya	
		500.3.8.4	Pengembangan Perkaderan UMK	
		500.3.9	Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga	
		500.3.10	Pedagog Kaki Lima (PKL)	
		500.3.10.1	Peraturan Perundang-Undangan	
		500.3.10.2	Sarana dan Prasarana	
		500.3.11	Monitoring dan Evaluasi	
		500.4	KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		500.4.1	Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		500.4.2	Perikanan Tangkap	
		500.4.2.1	Data dan Statistik Perikanan Tangkap	
		500.4.2.2	Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan	
		500.4.2.3	Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan	
		500.4.2.4	Pendaftaran Kapal Perikanan	
		500.4.2.5	Pengawasan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan	
		500.4.2.6	Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	
		500.4.2.7	Alokasi Usaha Penangkapan Ikan	
		500.4.2.8	Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan	
		500.4.2.9	Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan	
		500.4.2.10	Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan	
		500.4.2.11	Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan	
		500.4.2.12	Kelembagaan Usaha Penangkapan	
		500.4.2.13	Investasi dan Permodalan Usaha	
		500.4.2.14	Kenelayan	
		500.4.2.15	Pembinaan Pengelolaan Usaha	
		500.4.2.16	Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan	
		500.4.3	Perikanan Budidaya	
		500.4.3.1	Potensi Lahan dan Air	
		500.4.3.2	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar	
		500.4.3.3	Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar	
		500.4.3.4	Perbenihan Skala Kecil	
		500.4.3.5	Informasi dan Distribusi Pembenuhan	
		500.4.3.6	Budidaya Air Tawar	
		500.4.3.7	Budidaya Ikan Hias	
		500.4.3.8	Sertifikasi Budidaya Perikanan	
		500.4.3.9	Data dan Statistik Perikanan Budidaya	
		500.4.3.10	Hama dan Penyakit Ikan	
		500.4.3.11	Perlindungan Lingkungan Budidaya	
		500.4.3.12	Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya	
		500.4.3.13	Kewirausahaan Budidaya	
		500.4.3.14	Pelayanan Usaha Budidaya	
		500.4.3.15	Kelembagaan dan Ketenagakerjaan	
		500.4.3.16	Promosi Usaha dan Budaya	
		500.4.4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
		500.4.4.1	Standarisasi Pengolahan Hasil	
		500.4.4.2	Pengembangan Produk	
		500.4.4.3	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	
		500.4.4.4	Industri Pengolahan	
		500.4.4.5	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil	
		500.4.4.6	Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi	
		500.4.4.7	Promosi dan Jaringan Ikan Hias	
		500.4.4.8	Pengembangan Industri	
		500.4.4.9	Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi	
		500.4.4.10	Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri	
		500.4.4.11	Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri	
		500.4.4.12	Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri	
		500.4.4.13	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri	
		500.4.4.14	Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri	
		500.4.4.15	Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri	
		500.4.4.16	Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri	
		500.4.4.17	Pengembangan Ekspor	

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
			500.4.4.18	Pengembangan Impor
			500.4.4.19	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri
			500.4.4.20	Pelayanan Usaha
			500.4.4.21	Kemitraan Usaha
			500.4.4.22	Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran
			500.4.4.23	Investasi dan Permodalan
			500.4.4.24	Informasi dan Promosi
	500.4.5			Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
		500.4.5.1		Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi
		500.4.5.2		Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I
		500.4.5.3		Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II
		500.4.5.4		Informasi dan Evaluasi Spasial
		500.4.5.5		Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi
		500.4.5.6		Konservasi Wawasan
		500.4.5.7		Konservasi Jenis Ikan
		500.4.5.8		Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan
		500.4.5.9		Mitigasi Bencana Lingkungan
		500.4.5.10		Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan
		500.4.5.11		Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut
		500.4.5.12		Rehabilitasi dan Reklamasi
		500.4.5.13		Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil
		500.4.5.14		Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil
		500.4.5.15		Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil
		500.4.5.16		Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil
		500.4.5.17		Akses Permodalan
		500.4.5.18		Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
		500.4.5.19		Sosial Budaya Masyarakat
		500.4.5.20		Pengembangan Usaha
	500.4.6			Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
		500.4.6.1		Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat
		500.4.6.2		Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur
		500.4.6.3		Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran
		500.4.6.4		Pengawasan Usaha Budidaya
		500.4.6.5		Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi
		500.4.6.6		Pengawasan Pencemaran Perairan
		500.4.6.7		Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil
		500.4.6.8		Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Non Hayati
		500.4.6.9		Logistik dan Operasional Wilayah Barat
		500.4.6.10		Logistik dan Operasional Wilayah Timur
		500.4.6.11		Perawatan Kapal Pengawas
		500.4.6.12		Pengawakan Kapal Pengawas
		500.4.6.13		Sistem Pemantauan
		500.4.6.14		Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan
		500.4.6.15		Pemantauan Sumber Daya Perikanan
		500.4.6.16		Pengembangan Infrastruktur Pengawasan
		500.4.6.17		Penyidikan
		500.4.6.18		Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal
		500.4.6.19		Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan
		500.4.6.20		Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran
	500.4.7			Karantina Ikan
		500.4.7.1		Pemeriksaan Ikan
		500.4.7.2		Penahanan
		500.4.7.3		Pengasingan
		500.4.7.4		Pengamatan
		500.4.7.5		Pengakuan
		500.4.7.6		Penolakan
		500.4.7.7		Pemusnahan
		500.4.7.8		Persyaratan lalu Lintas Pemasukan
		500.4.7.9		Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran
		500.4.7.10		Permohonan Sertifikat
		500.4.7.11		Pemasukan Formulir
		500.4.7.12		Pemasukan Sertifikat
		500.4.7.13		Evaluasi dan Monitoring Sertifikat
		500.4.7.14		Surat Perintah
		500.4.7.15		Rekomendasi
		500.4.7.16		Penutupan Suatu Area
		500.4.7.17		Pelanggaran Lalu Lintas Ikan
		500.4.7.18		Pengawasan Peraturan Perkarantinaaan
		500.4.7.19		Pengawasan Pelaksanaan Operasional
		500.4.7.20		Instalasi Karantina Sementara
		500.4.7.21		Lokasi Karantina
500.5 PERTANIAN				
	500.5.1			Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.5.2			Perlindungan hortikultura
		500.5.2.1		Perlindungan Tanaman Buah
		500.5.2.2		Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
			500.5.2.3	Perlindungan Tanaman Florikultura
			500.5.2.4	Dampak iklim dan Persyaratan Teknis
		500.5.3		Perbenihan Hortikultura
			500.5.3.1	Penilaian Varietas
			500.5.3.2	Pengawasan Mutu Benih
			500.5.3.3	Budidaya dan Pascapanen Florikultura
		500.5.4		Perluasan dan Pengelolaan Lahan
			500.5.4.1	Basis Data Lahan
			500.5.4.2	Pengendalian Lahan
			500.5.4.3	Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
			500.5.4.4	Perluasan Kawasan Tanaman Pangan
			500.5.4.5	Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
		500.5.5		Pengelolaan Air Irigasi
			500.5.5.1	Pengembangan Sumber Air
			500.5.5.2	Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air
			500.5.5.3	Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
			500.5.5.4	Kelembagaan
		500.5.6		Pembiayaan Pertanian
			500.5.6.1	Pembiayaan Program
			500.5.6.2	Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama
			500.5.6.3	Pembiayaan agribisnis
			500.5.6.4	Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis
		500.5.7		Pupuk Pestisida
			500.5.7.1	Pupuk Organik dan Pembenh Tanah
			500.5.7.2	Pupuk Anorganik
			500.5.7.3	Pestisida
			500.5.7.4	Pengawasan Pupuk dan Pestisida
		500.5.8		Alat dan Mesin Pertanian
			500.5.8.1	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
			500.5.8.2	Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian
			500.5.8.3	Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian
		500.5.9		Perbenihan Tanaman Pangan
			500.5.9.1	Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih
			500.5.9.2	Produksi Benih Serealia
			500.5.9.3	Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi
			500.5.9.4	Kelembagaan Benih
		500.5.10		Budidaya Serealia
			500.5.10.1	Padi Irigasi dan Rawa
			500.5.10.2	Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering
			500.5.10.3	Jagung
			500.5.10.4	Serealia Lain
		500.5.11		Budidaya Aneka Kacang dan Umbi
			500.5.11.1	Kedelai
			500.5.11.2	Ubi Kayu
			500.5.11.3	Aneka Kacang
			500.5.11.4	Aneka Umbi
		500.5.12		Tanaman Pangan
			500.5.12.1	Pengelolaan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan
			500.5.12.2	Dampak Perubahan Iklim
			500.5.12.3	Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
			500.5.12.4	Pengelolaan Pengendalian Hama Tepadu
		500.5.13		Pascapanen Tanaman Pangan
			500.5.13.1	Padi
			500.5.13.2	Jagung dan Serealia alin
			500.5.13.3	Kedelai dan Aneka Kacang
			500.5.13.4	Aneka Umbi
		500.5.14		Pengolahan Hasil Pertanian
			500.5.14.1	Tanaman Pangan
			500.5.14.2	Hortikultura
			500.5.14.3	Perkebunan
			500.5.14.4	Peternakan
		500.5.15		Mutu dan Standarisasi
			500.5.15.1	Standardisasi
			500.5.15.2	Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu
			500.5.15.3	Akreditasi dan Kelembagaan
			500.5.15.4	Kerjasama dan Harmonisasi
		500.5.16		Pengembangan Usaha dan Investasi
			500.5.16.1	Kemitraan dan Kewirausahaan
			500.5.16.2	Investasi
			500.5.16.3	Promosi Dalam Negeri
			500.5.16.4	Promosi Luar Negeri
		500.5.17		Pemasaran Domestik
			500.5.17.1	Informasi Pasar
			500.5.17.2	Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga
			500.5.17.3	Sarana dan Kelembagaan Pasar
			500.5.17.4	Jaringan Pemasaran
		500.5.18		Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan (antara lain : Rencana Kerja, TOR/ Proposal,

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		500.5.19	Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	
		500.5.19.1	Hasil Penelitian dan Pengembangan	
		500.5.19.2	Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi	
		500.5.20	Diseminasi	
		500.5.21	Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian	
		500.5.21.1	Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demplot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop	
		500.5.21.2	Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi lainnya	
		500.5.22	Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	
		500.5.23	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	
		500.5.24	Data Penelitian dan Pengembangan	
		500.5.25	Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan	
		500.5.26	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	
		500.5.26.1	Hak Cipta	
		500.5.26.2	Hak Paten Sederhana	
		500.5.26.3	Hak Paten Biasa	
		500.5.26.4	Hak Merek	
		500.5.26.5	Pendaftaran Varietas Tanaman	
		500.5.26.6	Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan	
		500.5.26.7	Permohonan HKI yang ditolak	
		500.5.27	Pelayanan Perijinan Pertanian	
		500.5.27.1	Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)	
		500.5.27.2	Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis	
		500.5.27.3	Sarana III (bidang bibit, karkas, daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis	
		500.5.28	Pelayanan Hukum	
		500.5.28.1	Sertifikasi	
		500.5.28.2	Pertimbangan Hukum	
		500.5.29	Karantina Pertanian	
		500.5.29.1	Karantina Tumbuhan	
		500.5.29.2	Karantina Hewan	
		500.5.30	Bimbingan Teknis	
		500.5.31	Evaluasi	
500.6 PETERNAKAN				
		500.6.1	Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		500.6.2	Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		500.6.2.1	Perbibitan Ternak (antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non	
		500.6.2.2	Pakan Ternak	
		500.6.2.3	Budidaya Ternak	
		500.6.2.4	Kesehatan Hewan (antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan	
		500.6.2.5	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen (antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi,	
		500.6.3	Bimbingan Teknis	
		500.6.4	Evaluasi	
500.7 PERKEBUNAN				
		500.7.1	Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		500.7.2	Tanaman Semusim	
		500.7.2.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim	
		500.7.2.2	Perbenihan Tanaman Semusim	
		500.7.2.3	Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim	
		500.7.2.4	Pemberdayaan Tanaman Semusim	
		500.7.3	Tanaman Rempah & Penyegar	
		500.7.3.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar	
		500.7.3.2	Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar	
		500.7.3.3	Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar	
		500.7.3.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar	
		500.7.4	Tanaman Tahunan	
		500.7.4.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan	
		500.7.4.2	Perbenihan Tanaman Tahunan	
		500.7.4.3	Budidaya Tanaman Tahunan	
		500.7.4.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan	
		500.7.5	Perlindungan Perkebunan	
		500.7.5.1	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim,	
		500.7.5.2	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan	
		500.7.5.3	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan	
		500.7.5.4	Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran	
		500.7.6	Pascapanen dan Pembinaan Usaha	
		500.7.6.1	Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar	
		500.7.6.2	Pascapanen Tanaman Tahunan	
		500.7.6.3	Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan	
		500.7.6.4	Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik	
		500.7.7	Bimbingan Teknis Perkebunan	
		500.7.8	Evaluasi Perkebunan	
500.8 PERINDUSTRIAN				
		500.8.1	Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		500.8.2	Iklim Usaha dan Kerja Sama	
		500.8.2.1	Industri Manufaktur	

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
			500.8.2.2	Industri Agro
			500.8.2.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
			500.8.2.4	Industri Kecil dan Menengah
		500.8.3	Promosi Industri	
			500.8.3.1	Industri Manufaktur
			500.8.3.2	Promosi Industri Agro
			500.8.3.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
			500.8.3.4	Industri Kecil dan Menengah
		500.8.4	Standarisasi dan Teknologi	
			500.8.4.1	Industri Manufaktur
			500.8.4.2	Industri Agro
			500.8.4.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
			500.8.4.4	Industri Kecil dan Menengah
		500.8.5	Hak atas Kekayaan Intelektual	
			500.8.5.1	Industri Manufaktur
			500.8.5.2	Industri Agro
			500.8.5.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
			500.8.5.4	Industri Kecil dan Menengah
		500.8.6	Industri Hijau	
			500.8.6.1	Industri Manufaktur
			500.8.6.2	Industri Agro
			500.8.6.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
			500.8.6.4	Industri Kecil dan Menengah
		500.8.7	Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota	
		500.8.8	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)	
		500.8.9	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri	
		500.8.10	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri	
		500.8.11	Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional	
		500.8.12	Standarisasi	
			500.8.12.1	Standar
			500.8.12.2	Penyiapan Penerapan
			500.8.12.3	Infrastruktur Standar
		500.8.13	Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri	
			500.8.13.1	Kebijakan Industri
			500.8.13.2	Perpajakan dan Tarif
			500.8.13.3	Pengembangan Model Industrial
		500.8.14	Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup	
			500.8.14.1	Industri Hijau
			500.8.14.2	Lingkungan Hidup
			500.8.14.3	Energi
		500.8.15	Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual	
			500.8.15.1	Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri
			500.8.15.2	Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri
			500.8.15.3	Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual
		500.8.16	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri	
		500.9	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
		500.9.1	Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		500.9.2	Rekomendasi Kegeologian	
			500.9.2.1	Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah
			500.9.2.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
			500.9.2.3	Pertambangan
			500.9.2.4	Panas Bumi
			500.9.2.5	Geosains
			500.9.2.6	Pengukuran Time Domain Electromagnetic (TDEM)
			500.9.2.7	Kelayakan Lingkungan
		500.9.3	Penelitian Kegeologian	
			500.9.3.1	Administrasi pelaksanaan penelitian
			500.9.3.2	Administrasi tenaga penelitian
			500.9.3.3	Administrasi penggunaan peralatan penelitian
			500.9.3.4	Log-book peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi
			500.9.3.5	Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian
			500.9.3.6	Sumber Daya Geologi
			500.9.3.7	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
			500.9.3.8	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
			500.9.3.9	Survei Geologi
		500.9.4	Inventarisasi dan evaluasi kegeologian	
			500.9.4.1	Sumber Daya Geologi
			500.9.4.2	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
			500.9.4.3	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
			500.9.4.4	Survei Geologi
			500.9.4.5	Konservasi
		500.9.5	Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi	
			500.9.5.1	Peta potensi dan sebaran
			500.9.5.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
			500.9.5.3	Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan
			500.9.5.4	Survei Geologi

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		500.9.6		Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
		500.9.6.1		Rencana Induk Jaringan Gas Bumi
		500.9.6.2		Rencana dan Realisasi Investasi
		500.9.6.3		Penetapan Harga Minyak Mentah
		500.9.6.4		Penetapan Bagii Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi
		500.9.6.5		Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
		500.9.6.6		Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
		500.9.6.7		Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri
		500.9.6.8		Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)
		500.9.7		Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
		500.9.7.1		Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non
		500.9.7.2		Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemanfaatan Data Migas untuk presentasi
		500.9.7.3		Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksplorasi
		500.9.7.4		Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)
		500.9.7.5		Perpanjangan Kontrak KKS
		500.9.7.6		Penetapan Alokasi dan Harga Gas
		500.9.7.7		Partisipasi Interest
		500.9.7.8		Tumpang Tindih Lahan
		500.9.8		Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
		500.9.8.1		Perumusan pedoman, prosedur, layanan serta pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan,
		500.9.8.2		Fasilitas dan pertimbangan pelanggan
		500.9.8.3		Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
		500.9.9		Teknik dan Lingkungan
		500.9.9.1		Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) / Standar
		500.9.9.2		Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) (antara lain: Berkas permohonan, Berita Acara Hasil
		500.9.9.3		Buku Register Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)
		500.9.9.4		Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las
		500.9.9.5		Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian
		500.9.9.6		Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian
		500.9.9.7		Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan
		500.9.9.8		Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir
		500.9.9.9		Penghargaan Keselamatan Kerja (antara lain: Surat Permohonan Mendapatkan Penghargaan,
		500.9.9.10		Usaha penunjang
		500.9.10		Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
		500.9.10.1		Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
		500.9.10.2		Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
		500.9.10.3		Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
		500.9.10.4		Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastuktur Minyak dan Gas Bumi
		500.9.11		Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi
		500.9.11.1		Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi
		500.9.11.2		Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga
		500.9.11.3		Penyiapan Program Pemanfaatan Energi
		500.9.11.4		Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT
		500.9.11.5		Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT
		500.9.11.6		Penyusunan Neraca Energi
		500.9.11.7		Road Map di Bidang EBT
		500.9.12		Panas Bumi
		500.9.12.1		Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
		500.9.12.2		Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)
		500.9.12.3		Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan
		500.9.12.4		Rekomendasi Bahan Peledak
		500.9.12.5		Perizinan penggunaan gudang bahan peledak
		500.9.12.6		Izin Tangki Bahan Bakar Cair
		500.9.12.7		Persetujuan sertifikasi Welding Prosedure Specifikation (WPS) dan Prosedure Qualification
		500.9.12.8		Penerbitan Izin Usaha Panas Bumi (IUP)
		500.9.12.9		Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)
		500.9.12.10		Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)
		500.9.12.11		Penetapan kapasitas usaha panas bumi
		500.9.12.12		Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
		500.9.12.13		Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi
		500.9.12.14		Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi
		500.9.12.15		Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi
		500.9.12.16		Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada
		500.9.12.17		Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi
		500.9.13		Bioenergi
		500.9.13.1		Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)
		500.9.13.2		Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)
		500.9.13.3		Penerbitan Rekomendasi Ekspor - Impor
		500.9.13.4		Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)
		500.9.13.5		Evaluasi/Revisi HIP BBN
		500.9.13.6		Database Pengusahaan Bioenergi
		500.9.13.7		Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit
		500.9.13.8		Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati
		500.9.13.9		Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga
		500.9.14		Aneka Energi
		500.9.14.1		Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi
		500.9.14.2		Penetapan Kapasitas Usaha

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
			500.9.14.3	Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
			500.9.14.4	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham
			500.9.14.5	Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)
		500.9.15		Konservasi Energi
			500.9.15.1	Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi
			500.9.15.2	Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi
			500.9.15.3	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajemen energi di pengguna energi di atas 6.000
			500.9.15.4	Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast
			500.9.15.5	Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi
			500.9.15.6	Penyusunan emisi energi gas rumah kaca
			500.9.15.7	Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi
			500.9.15.8	Profil investasi efisiensi energi
			500.9.15.9	Invesment Grade Audit (IGA)
			500.9.15.10	Bimbingan Teknis Bidang EBTKE
		500.9.16		Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE
			500.9.16.1	Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga
			500.9.16.2	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
			500.9.16.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE
			500.9.16.4	Evaluasi Program Kerja
		500.9.17		Bina Program Tenaga Listrik
			500.9.17.1	Investasi dan pendanaan tenaga listrik (antara lain: Dokumen grant/hibah/loan agreement luar
			500.9.17.2	Pengembangan listrik pedesaan (antara lain: Data program listrik pedesaan, Data rasio
			500.9.17.3	Data dan Informasi Ketenagalistrikan
		500.9.18		Bina Usaha Ketenagalistrikan
			500.9.18.1	Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan (antara lain: Pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik
			500.9.18.2	Harga dan Subsidi Listrik
			500.9.18.3	Hubungan komersial tenaga listrik
			500.9.18.4	Perlindungan konsumen listrik (antara lain: Penanganan pengaduan konsumen listrik,
		500.9.19		Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
			500.9.19.1	Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan
			500.9.19.2	Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan
			500.9.19.3	Usaha penunjang ketenagalistrikan (antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga
			500.9.19.4	Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan (antara lain: Dokumen forum keselamatan instalasi
		500.9.20		Sertifikasi
			500.9.20.1	Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik
			500.9.20.2	Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)
			500.9.20.3	Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik
			500.9.20.4	Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik
			500.9.20.5	Registrasi Sertifikasi
		500.9.21		Akreditasi Ketenagalistrikan
		500.9.22		Standarisasi Kompetensi
		500.9.23		Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan
			500.9.23.1	Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
			500.9.23.2	Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
			500.9.23.3	Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
			500.9.23.4	Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
		500.9.24		Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan
			500.9.24.1	Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
			500.9.24.2	Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
			500.9.24.3	Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)
			500.9.24.4	Laporan berkala pemegang penunjukan LIT
			500.9.24.5	Laporan hasil pengawasan penunjukan
		500.9.25		Bina Program Mineral dan Batubara
			500.9.25.1	Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara
			500.9.25.2	Rencana Induk Mineral dan Batubara
			500.9.25.3	Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batubara
			500.9.25.4	Data dan Informasi Mineral dan Batubara
			500.9.25.5	Pelaporan Program Mineral dan Batubara
			500.9.25.6	Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara melalui
			500.9.25.7	Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara
			500.9.25.8	Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara
			500.9.25.9	Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara
		500.9.26		Pembinaan Pengusahaan Mineral
			500.9.26.1	Ketenagakerjaan
			500.9.26.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
			500.9.26.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral
			500.9.26.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral
			500.9.26.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral
			500.9.26.6	Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan
			500.9.26.7	Perizinan usaha pertambangan mineral
			500.9.26.8	Kontrak Karya (KK)
			500.9.26.9	Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)
			500.9.26.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
			500.9.26.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral
			500.9.26.12	Teguran kepada pengusaha Kontrak Karya (KK)
			500.9.26.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral
			500.9.26.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
				500.9.26.15 Pelaporan usaha pertambangan mineral
				500.9.26.16 Penghargaan usaha pertambangan mineral
				500.9.26.17 Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral
	500.9.27			Pembinaan Pengusahaan Batubara
		500.9.27.1		Ketenagakerjaan
		500.9.27.2		Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
		500.9.27.3		Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batubara
		500.9.27.4		Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara
		500.9.27.5		Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara
		500.9.27.6		Pengawasan produksi dan pemasaran batubara (bitumen padat, batuan aspal, batubara dan
		500.9.27.7		Perizinan Usaha Pertambangan Batubara
		500.9.27.8		Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
		500.9.27.9		Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) antara lain: Persetujuan
		500.9.27.10		Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
		500.9.27.11		Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya
		500.9.27.12		Teguran kepada pengusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
		500.9.27.13		Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara
		500.9.27.14		Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan
		500.9.27.15		Pelaporan usaha pertambangan batubara
		500.9.27.16		Penghargaan usaha pertambangan batubara
		500.9.27.17		Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara
	500.9.28			Penerimaan Negara
		500.9.28.1		Penerimaan Negara Bukan Pajak
		500.9.28.2		Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
		500.9.28.3		Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
	500.9.29			Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
		500.9.29.1		Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/ RSKKNI (Rancangan Standar
		500.9.29.2		Pengawasan Standardisasi
		500.9.29.3		Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang
		500.9.29.4		Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja (antara lain: Laporan Kecelakaan
		500.9.29.5		Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang (antara lain: Pemeriksaan
		500.9.29.6		Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
		500.9.29.7		Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
		500.9.29.8		Rekomendasi bahan kimia
		500.9.29.9		Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (antara lain: Laporan
		500.9.29.10		Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/ laporan tahunan pelaksanaan
		500.9.29.11		Pemberian Penghargaan (antara lain: Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan,
		500.9.29.12		Pengawasan lingkungan pertambangan
		500.9.29.13		Usaha Jasa Mineral dan Batubara
		500.9.29.14		Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batubara
		500.9.29.15		Rekomendasi Teknis (antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen
		500.9.29.16		Persetujuan Teknis (antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen
		500.9.29.17		Pengawasan Teknis
		500.9.29.18		Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara
		500.9.29.19		Pembinaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara (antara lain: Sosialisasi
	500.9.30			Program Penelitian dan Pengembangan
		500.9.30.1		Rencana Penelitian dan Pengembangan
		500.9.30.2		Pengembangan dan inovasi
		500.9.30.3		Dokumen penerapan/pemanfaatan/pendayagunaan/replikasi/prototipe hasil penelitian/
		500.9.30.4		Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi
		500.9.30.5		Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
		500.9.30.6		Pembinaan penelitian/Pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan
		500.9.30.7		Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan
		500.9.30.8		Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan
		500.9.30.9		Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan
		500.9.30.10		Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)
		500.9.30.11		Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
		500.9.30.12		Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK
		500.9.30.13		Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral
	500.9.31			Sarana Litbang
		500.9.31.1		Administrasi penggunaan peralatan
		500.9.31.2		Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi
	500.9.32			Afiliasi
		500.9.32.1		Proyek Percontohan
		500.9.32.2		Promosi dan Layanan Jasa Teknologi
		500.9.32.3		Pembinaan Penelitian dan Pengembangan
		500.9.32.4		Penyajian Informasi
	500.9.33			Penelitian dan Pengembangan Kegeologian
		500.9.33.1		Pemetaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelautan
		500.9.33.2		Energi Kelautan dan Wilayah Penelitian Energi dan kewilayahan pantai
		500.9.33.3		Penelitian sumber daya energi dan mineral kelautan
		500.9.33.4		Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan
	500.9.34			Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi
		500.9.34.1		Teknologi Eksplorasi
		500.9.34.2		Teknologi Eksploitasi
		500.9.34.3		Laboratorium
		500.9.34.4		Study

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
			500.9.34.5	Teknologi Proses
			500.9.34.6	Teknologi Aplikasi Produk
			500.9.34.7	Teknologi Gas
		500.9.35	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara	
			500.9.35.1	Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya
			500.9.35.2	Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral
			500.9.35.3	Teknologi Pemanfaatan Batubara
		500.9.36	Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan	
			500.9.36.1	Energi baru terbarukan
			500.9.36.2	Teknologi Ketenagalistrikan
			500.9.36.3	Lingkungan dan Konservasi Energi
			500.9.36.4	Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan
500.1 PERHUBUNGAN				
			500.10.1	Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
			500.10.2	Jaringan Prasarana dan Pelayanan
			500.10.2.1	Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang
			500.10.2.2	Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C
			500.10.2.3	Penetapan lokasi terminal barang utama
			500.10.2.4	Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal
			500.10.2.5	Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi
			500.10.2.6	Jaringan lintas pada jaringan jalan primer
			500.10.2.7	Penetapan kelas jalan primer
			500.10.2.8	Kualifikasi teknis petugas terminal
			500.10.2.9	Jaringan transportasi jalan sekunder
			500.10.3	Pengembangan Transportasi Jalan
			500.10.3.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
			500.10.3.2	Pengembangan transportasi jalan
			500.10.4	Pengujian Kendaraan Bermotor
			500.10.4.1	Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor
			500.10.4.2	Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor
			500.10.4.3	Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor
			500.10.4.4	Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor
			500.10.5	Teknologi Kendaraan Bermotor
			500.10.5.1	Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor
			500.10.5.2	Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor
			500.10.5.3	Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor
			500.10.5.4	Harmonisasi dan standarisasi regulasi kendaraan bermotor
			500.10.6	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
			500.10.6.1	Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan
			500.10.6.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional
			500.10.7	Perlengkapan Jalan
			500.10.7.1	Pedoman teknis perlengkapan jalan
			500.10.7.2	Penimbangan kendaraan bermotor di jalan
			500.10.7.3	Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor
			500.10.7.4	Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor
			500.10.7.5	Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional
			500.10.8	Angkutan Penumpang
			500.10.8.1	Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi
			500.10.8.2	Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara
			500.10.8.3	Izin trayek antar kota antar provinsi
			500.10.8.4	Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah
			500.10.8.5	Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum
			500.10.8.6	Pemberian subsidi angkutan umum
			500.10.8.7	Angkutan perintis
			500.10.8.8	Penghargaan perusahaan angkutan umum
			500.10.9	Angkutan Barang
			500.10.9.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
			500.10.9.2	Tarif angkutan barang
			500.10.9.3	Izin operasi angkutan barang tertentu
			500.10.9.4	Pembinaan angkutan barang
			500.10.9.5	Izin dispensasi angkutan jalan
			500.10.10	Monitoring Operasional
			500.10.10.1	Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
			500.10.10.2	Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional
			500.10.10.3	Berkas Pelanggaran Perda
			500.10.11	Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil
			500.10.11.1	Pedoman Teknis
			500.10.11.2	Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
			500.10.11.3	Bimtek PPNS
			500.10.11.4	Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
			500.10.12	Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
			500.10.12.1	Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan
			500.10.12.2	Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan
			500.10.13	Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
			500.10.13.1	Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta
			500.10.13.2	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		500.10.14		Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
		500.10.15		Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
			500.10.15.1	Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan
			500.10.15.2	Pengawasan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau dan penyeberangan
		500.10.16		Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
			500.10.16.1	Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
			500.10.16.2	Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan
			500.10.16.3	Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional
			500.10.16.4	Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan
		500.10.17		Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
		500.10.18		Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan
			500.10.18.1	Manajemen lalu lintas
			500.10.18.2	Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan
			500.10.18.3	Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau
			500.10.18.4	Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan
		500.10.19		Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan
			500.10.19.1	Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan
			500.10.19.2	Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau
			500.10.19.3	Perambuan sungai, danau dan penyeberangan
		500.10.20		Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
			500.10.20.1	Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
			500.10.20.2	Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional
		500.10.21		Tarif dan Keperintisan
			500.10.21.1	Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan
			500.10.21.2	Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan
		500.10.22		Bina Sistem Transportasi Perkotaan
			500.10.22.1	Jaringan Transportasi Perkotaan
			500.10.22.2	Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan
			500.10.22.3	Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi
		500.10.23		Lalu Lintas Perkotaan
			500.10.23.1	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan
			500.10.23.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
			500.10.23.3	Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah
		500.10.24		Angkutan Perkotaan
			500.10.24.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek
			500.10.24.2	Jaringan trayek perkotaan
			500.10.24.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah
		500.10.25		Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan
			500.10.25.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau
			500.10.25.2	Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara,
			500.10.25.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang
		500.10.26		Dampak Transportasi Perkotaan
			500.10.26.1	Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan
			500.10.26.2	Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan
			500.10.26.3	Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan
			500.10.26.4	Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota
			500.10.26.5	Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
			500.10.26.6	Masterplan transportasi perkotaan
		500.10.27		Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan
			500.10.27.1	Monitoring dan evaluasi data kecelakaan
			500.10.27.2	Kualifikasi unit pengkajian
			500.10.27.3	Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan,
		500.10.28		Pengembangan Keselamatan
			500.10.28.1	Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan
			500.10.28.2	Harmonisasi kebijakan
		500.10.29		Promosi dan Kemitraan Keselamatan
			500.10.29.1	Promosi Keselamatan : penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan
			500.10.29.2	Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan
		500.10.30		Bina Keselamatan Angkutan Umum
			500.10.30.1	Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
			500.10.30.2	Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau
		500.10.31		Audit Keselamatan
			500.10.31.1	Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia
			500.10.31.2	Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan
			500.10.31.3	Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
		500.10.32		Inspeksi Keselamatan
			500.10.32.1	Pedoman keselamatan
			500.10.32.2	Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan
			500.10.32.3	Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
		500.10.33		Parkir
			500.10.33.1	Surat Tugas Juru Parkir
			500.10.33.2	Izin tempat khusus parkir swasta
			500.10.33.3	Surat Tugas TKP Pemerintah
500.1 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
		500.11.1		Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
		500.11.2		Telekomunikasi

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		500.11.2.1	Layanan Jaringan Telekomunikasi	
		500.11.2.2	Layanan Jasa Telekomunikasi	
		500.11.2.3	Penomoran Telekomunikasi dan Informatika	
		500.11.2.4	Kelayakan Sistem Telekomunikasi	
	500.11.3		Penyiaran	
		500.11.3.1	Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi	
		500.11.3.2	Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi	
	500.11.4		Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal	
		500.11.4.1	Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah	
		500.11.4.2	Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah	
		500.11.4.3	Layanan Khusus Penyiaran	
		500.11.4.4	Pelayanan Kewajiban Universal	
		500.11.4.5	Pengembangan Infrastruktur	
	500.11.5		Pengendalian Informatika	
		500.11.5.1	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi	
		500.11.5.2	Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi	
		500.11.5.3	Monitoring dan Evaluasi Penyiaran	
		500.11.5.4	Pencegahan dan Penertiban	
	500.11.6		e- Government	
		500.11.6.1	Tata Kelola e-Government	
		500.11.6.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Government	
		500.11.6.3	Interoperabilitas dan Interkoneksi e-Government	
		500.11.6.4	Aplikasi Layanan Pemerintahan	
		500.11.6.5	Aplikasi Layanan Publik	
	500.11.7		e- Business	
		500.11.7.1	Tata Kelola e-Business	
		500.11.7.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Business	
		500.11.7.3	Interoperabilitas dan Interkoneksi e-Business	
		500.11.7.4	Aplikasi Layanan e-Business	
	500.11.8		Pemberdayaan Informatika Masyarakat	
		500.11.8.1	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan	
		500.11.8.2	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Kelurahan	
	500.11.9		Pemberdayaan Industri Informatika	
		500.11.9.1	Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika	
		500.11.9.2	Industri Perangkat Informatika Pengguna	
		500.11.9.3	Industri Perangkat Lunak	
		500.11.9.4	Industri Konten Multimedia	
	500.11.10		Keamanan Informasi	
		500.11.10.1	Tata Kelola Keamanan Informasi	
		500.11.10.2	Teknologi Keamanan Informasi	
		500.11.10.3	Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi	
		500.11.10.4	Penyidikan dan Penindakan	
		500.11.10.5	Budaya Keamanan Informasi	
	500.11.11		Komunikasi Publik	
		500.11.11.1	Tata Kelola Komunikasi Publik	
		500.11.11.2	Pengelolaan Opini Publik	
		500.11.11.3	Layanan Komunikasi Publik	
	500.11.12		Pengolahan dan Penyediaan Informasi	
		500.11.12.1	Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan	
		500.11.12.2	Informasi Perekonomian	
		500.11.12.3	Informasi Kesejahteraan Rakyat	
	500.11.13		Pengelolaan Media Publik	
		500.11.13.1	Media Cetak	
		500.11.13.2	Media Online	
		500.11.13.3	Media Luar Ruang dan Audio Visual	
	500.11.14		Kemitraan Komunikasi	
		500.11.14.1	Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara	
		500.11.14.2	Kemitraan Media dan Dunia Usaha	
		500.11.14.3	Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi	
	500.11.15		Infrastruktur Informatika	
		500.11.15.1	Jaringan	
		500.11.15.2	Piranti Teknologi Informatika	
		500.11.15.3	Keamanan Informatika	
	500.11.16		Sistem dan Data	
		500.11.16.1	Portal dan Konten	
		500.11.16.2	Pengumpulan dan Pengolahan Data	
		500.11.16.3	Pengembangan Aplikasi	
	500.11.17		Pusat Kerjasama	
		500.11.17.1	Kerja Sama daerah	
		500.11.17.2	Kerja Sama Bilateral	
	500.11.18		Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat	
		500.11.18.1	Pelayanan Informasi	
		500.11.18.2	Hubungan Masyarakat	
		500.11.18.3	Bimbingan Teknis	
	500.11.19		Evaluasi	
500.1 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		500.12.1		Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
		500.12.2		Pengembangan Destinasi Wisata
		500.12.2.1		Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata
		500.12.2.2		Pengembangan Daya Tarik Wisata
		500.12.2.3		Industri Pariwisata
		500.12.2.4		Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata
		500.12.2.5		Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event
		500.12.3		Pemasaran Pariwisata
		500.12.3.1		Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata
		500.12.3.2		Promosi Pariwisata Luar Negeri
		500.12.3.3		Promosi Pariwisata Dalam Negeri
		500.12.3.4		Pencitraan Indonesia
		500.12.4		Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya
		500.12.4.1		Pengembangan industri Perfilman
		500.12.4.2		Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik
		500.12.4.3		Pengembangan Seni Rupa
		500.12.5		Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK
		500.12.5.1		Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media
		500.12.5.2		Desain dan Arsitektur
		500.12.5.3		Kerjasama dan Fasilitasi
		500.12.6		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		500.12.6.1		Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata
		500.12.6.2		Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif
		500.12.6.3		Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
		500.12.6.4		Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
500.1 STATISTIK				
		500.13.1		Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
		500.13.2		Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi
		500.13.2.1		Perencanaan
		500.13.2.2		Persiapan (antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan
		500.13.2.3		Pelaksanaan Lapangan
		500.13.2.4		Pengolahan (antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokan/
		500.13.2.5		Analisis dan Penyajian Hasil Sensus
		500.13.2.6		Diseminasi hasil sensus
		500.13.3		Survei
		500.13.3.1		Perencanaan
		500.13.3.2		Persiapan
		500.13.3.3		Pelaksanaan Lapangan (antara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel, Pengumpulan data,
		500.13.3.4		Pengolahan (antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokan/
		500.13.3.5		Analisis dan Penyajian Hasil Survei (antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan,
		500.13.3.6		Diseminasi hasil Survei
		500.13.4		Konsolidasi Data Statistik
		500.13.4.1		Kompilasi Data
		500.13.4.2		Analisis data
		500.13.4.3		Penyusunan Publikasi
		500.13.5		Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik
500.1 KETENAGAKERJAAN				
		500.14.1		Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
		500.14.2		Perencanaan Tenaga Kerja
		500.14.2.1		Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah
		500.14.2.2		Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta
		500.14.3		Pengembangan Standarisasi Kompetensi
		500.14.3.1		Penerapan Standar Kompetensi
		500.14.3.2		Pengembangan Standarisasi Kompetensi
		500.14.3.3		Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan
		500.14.3.4		Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan
		500.14.3.5		Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian
		500.14.4		Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja
		500.14.4.1		Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan
		500.14.4.2		Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan
		500.14.4.3		Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan
		500.14.4.4		Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga
		500.14.5		Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
		500.14.5.1		Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah
		500.14.5.2		Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta
		500.14.5.3		Tenaga Pelatihan
		500.14.5.4		Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan
		500.14.6		Bina Pemagangan
		500.14.6.1		Pemagangan Dalam Negeri
		500.14.6.2		Pemagangan Luar Negeri
		500.14.6.3		Perizinan dan Advokasi Pemagangan
		500.14.6.4		Promosi dan Jenjang Pemagangan
		500.14.7		Produktivitas dan Kewirausahaan
		500.14.7.1		Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan
		500.14.7.2		Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
			500.14.7.3	Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas
			500.14.7.4	Pengembangan Kewirausahaan
		500.14.8		Pengembangan Pasar Kerja
			500.14.8.1	Informasi Pasar Kerja
			500.14.8.2	Analisis Pasar Kerja
			500.14.8.3	Bursa Kerja
			500.14.8.4	Analisis Jabatan
		500.14.9		Penempatan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
			500.14.9.1	Antar Kerja
			500.14.9.2	Penempatan Tenaga Kerja Khusus
			500.14.9.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
			500.14.9.4	Pemberdayaan Pengantar Kerja
		500.14.10		Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal
			500.14.10.1	Tenaga Kerja Mandiri dan Sektor Informal
			500.14.10.2	Pengembangan Padat Karya
			500.14.10.3	Terapan Teknologi Tepat Guna
			500.14.10.4	Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga
		500.14.11		Standardisasi Profesi
			500.14.11.1	Sistem Informasi dan Registrasi
			500.14.11.2	Pembakuan Akreditasi
		500.14.12		Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi
			500.14.12.1	Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama
			500.14.12.2	Perjanjian Kerja
			500.14.12.3	Kesejahteraan Pekerja
			500.14.12.4	Analisis Diskriminasi Syarat Kerja
		500.14.13		Kelembagaan dan Pemasarakatan Hubungan Industrial
			500.14.13.1	Organisasi Pekerja dan Pengusaha
			500.14.13.2	Kelembagaan Hubungan Industrial
			500.14.13.3	Pemasarakatan Hubungan Industrial
		500.14.14		Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
			500.14.14.1	Pengupahan
			500.14.14.2	Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja
		500.14.15		Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial
			500.14.15.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
			500.14.15.2	Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
			500.14.15.3	Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
		500.14.16		Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
			500.14.16.1	Pengawasan Norma Kerja
			500.14.16.2	Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat
			500.14.16.3	Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja
		500.14.17		Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak
			500.14.17.1	Pengawasan Norma Kerja Perempuan
			500.14.17.2	Pengawasan Norma Kerja Anak
			500.14.17.3	Kerjasama Lintas Sektor
			500.14.17.4	Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak
		500.14.18		Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
			500.14.18.1	Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan
			500.14.18.2	Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran
			500.14.18.3	Pengawasan Norma Kesehatan Kerja
			500.14.18.4	Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
			500.14.18.5	Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3
		500.14.19		Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan
		500.14.20		Bina Penegakan Hukum
			500.14.20.1	Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
			500.14.20.2	Penyidikan Norma Ketenagakerjaan
			500.14.20.3	Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
			500.14.20.4	Kerjasama Penegakan Hukum
		500.14.21		Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
			500.14.21.1	Analisis dan Standardisasi bidang K 3
			500.14.21.2	Hasil kajian, perekayasa dan penerapan teknologi dan alih teknologi K 3
			500.14.21.3	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K 3
			500.14.21.4	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3
		500.14.22		Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
			500.14.22.1	Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
			500.14.22.2	Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
			500.14.22.3	Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
			500.14.22.4	Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
			500.14.22.5	Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
			500.14.22.6	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
500.1 PENANAMAN MODAL				
		500.15.1		Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
		500.15.2		Perencanaan Penanaman Modal
			500.15.2.1	Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya
			500.15.2.2	Perencanaan Industri Manufaktur
			500.15.2.3	Perencanaan Jasa dan Kawasan
			500.15.2.4	Perencanaan Infrastruktur

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		500.15.3		Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		500.15.3.1		Deregulasi Penanaman Modal
		500.15.3.2		Pengembangan Potensi Daerah
		500.15.3.3		Pemberdayaan Usaha
		500.15.3.4		Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan
		500.15.3.5		Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha
		500.15.3.6		Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha
		500.15.4		Promosi Penanaman Modal
		500.15.4.1		Pengembangan Promosi
		500.15.4.2		Analisis Strategi Promosi
		500.15.4.3		Fasilitasi Promosi Luar Negeri
		500.15.4.4		Promosi Sektoral
		500.15.4.5		Fasilitasi Promosi Daerah
		500.15.4.6		Pameran dan Sarana Promosi
		500.15.5		Kerja Sama Penanaman Modal
		500.15.5.1		Kerja Sama Bilateral dan Multilateral
		500.15.5.2		Kerja Sama Regional
		500.15.5.3		Kerja Sama Dunia Usaha Internasional
		500.15.6		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		500.15.6.1		Pemantauan Penanaman Modal
		500.15.6.2		Data Realisasi Penanaman Modal
		500.15.6.3		Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal
		500.15.6.4		Fasilitasi Penyelesaian Masalah
		500.15.6.5		Pengawasan Penanaman Modal
		500.15.6.6		Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal
		500.15.7		Pelayanan Penanaman Modal
		500.15.7.1		Pelayanan Aplikasi
		500.15.7.2		Pelayanan Perijinan
		500.15.7.3		Pelayanan Konsultasi Perijinan
		500.15.7.4		Pelayanan Non Perijinan
		500.15.7.5		Pelayanan Fasilitas
500.1 PERTANAHAN				
		500.16.1		Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
		500.16.2		Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan
		500.16.2.1		Fasilitasi Pengadaan Tanah
		500.16.2.2		Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan
		500.16.2.3		Data dan Informasi Pertanahan
		500.16.2.4		Advokasi dan Pengendalian
		500.16.3		Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah
		500.16.3.1		Penatagunaan Tanah
		500.16.3.2		Data dan Pemetaan Tematik
		500.16.3.3		Penguatan Atas Tanah
		500.16.4		Sengketa Tanah
		500.16.4.1		Pengkajian dan Penanganan Sengketa
		500.16.4.2		Advokasi dan Pengendalian
500.1 TRANSMIGRASI				
		500.17.1		Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
		500.17.2		Penyediaan Tanah Transmigrasi
		500.17.2.1		Fasilitasi Pengadaan Tanah
		500.17.2.2		Pengurusan Legalitas Tanah
		500.17.2.3		Dokumentasi Pertanahan
		500.17.2.4		Advokasi Pertanahan
		500.17.3		Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi
		500.17.3.1		Penyiapan Lahan
		500.17.3.2		Penyiapan Sarana
		500.17.3.3		Penyiapan Prasarana
		500.17.3.4		Evaluasi Kelayakan Permukiman
		500.17.4		Fasilitasi Penempatan Transmigrasi
		500.17.4.1		Penyiapan Calon Transmigrasi
		500.17.4.2		Penyiapan Perpindahan
		500.17.4.3		Pelaksanaan Perpindahan
		500.17.4.4		Penataan dan Adaptasi
		500.17.5		Partisipasi Masyarakat
		500.17.5.1		Promosi dan Motivasi
		500.17.5.2		Kerjasama Kelembagaan
		500.17.5.3		Kerjasama Antar Daerah
		500.17.5.4		Pelayanan Investasi
		500.17.6		Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
		500.17.6.1		Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
		500.17.6.2		Bina Sistem Informasi
		500.17.6.3		Perencanaan Pengembangan Kawasan
		500.17.6.4		Perencanaan Pengembangan Masyarakat
		500.17.6.5		Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan
		500.17.7		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat
		500.17.7.1		Bantuan Pangan dan Kesehatan

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
			500.17.7.2	Fasilitas Sosial Budaya
			500.17.7.3	Pengembangan Kelembagaan
			500.17.7.4	Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi
		500.17.8		Pengembangan Usaha
			500.17.8.1	Kewirausahaan
			500.17.8.2	Produksi
			500.17.8.3	Pengolahan Hasil dan Pemasaran
			500.17.8.4	Lembaga Ekonomi dan permodalan
		500.17.9		Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan
			500.17.9.1	Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana
			500.17.9.2	Pengembangan Sarana
			500.17.9.3	Pengembangan Prasarana
			500.17.9.4	Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana
		500.17.10		Penyerasian Lingkungan
			500.17.10.1	Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
			500.17.10.2	Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan
			500.17.10.3	Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi
			500.17.10.4	Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan
600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN				
600.1 PEKERJAAN UMUM				
		600.1.1		Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
		600.1.2		Penatagunaan Sumber Daya Air
			600.1.2.1	Perencanaan Wilayah Sungai
			600.1.2.2	Kelembagaan
			600.1.2.3	Pemanfaatan Sumber Daya Air
			600.1.2.4	Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air
			600.1.2.5	Pengaturan dan Pemantauan
		600.1.3		Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air
			600.1.3.1	Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air
			600.1.3.2	Manajemen Mutu
			600.1.3.3	Informasi dan Data Sumber Daya Air
			600.1.3.4	Keterpaduan Pemrograman
		600.1.4		Pengelolaan Sumber Daya Air
			600.1.4.1	Pengelolaan Sungai dan Pantai
			600.1.4.2	Pengelolaan Irigasi dan Rawa
			600.1.4.3	Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
			600.1.4.4	Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku
		600.1.5		Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
			600.1.5.1	Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai
			600.1.5.2	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa
			600.1.5.3	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
			600.1.5.4	Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku
			600.1.5.5	Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
		600.1.7		Pengembangan Jaringan Jalan
			600.1.7.1	Keterpaduan Perencanaan
			600.1.7.2	Sistem Jaringan Jalan
			600.1.7.3	Lingkungan dan Keselamatan Jalan
		600.1.8		Pembangunan Jalan
			600.1.8.1	Standar dan Pedoman
			600.1.8.2	Manajemen Konstruksi
			600.1.8.3	Pengelolaan Gedometri, Perkerasan, dan Drainage
			600.1.8.4	Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng
		600.1.9		Preservasi Jalan
			600.1.9.1	Standar dan Pedoman
			600.1.9.2	Perencanaan Teknis
			600.1.9.3	Teknik Rekonstruksi
			600.1.9.4	Teknik Pemeliharaan Jalan
		600.1.10		Pengelolaan Jembatan
			600.1.10.1	Standar dan Pedoman
			600.1.10.2	Perencanaan Teknis
			600.1.10.3	Teknik Jembatan
			600.1.10.4	Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus
		600.1.11		Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah
			600.1.11.1	Bimbingan Teknik Jalan Daerah
			600.1.11.2	Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar
			600.1.11.3	Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan
		600.1.12		Pengaturan Jalan Tol
			600.1.12.1	Persiapan pengusaha jalan tol
			600.1.12.2	Pengadaan Investasi Jalan Tol
			600.1.12.3	Teknik Pengaturan Jalan Tol
			600.1.12.4	Pengambilalihan hak pengusaha jalan tol
		600.1.13		Keterpaduan Infrastruktur Permukiman
			600.1.13.1	Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan
			600.1.13.2	Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan
		600.1.14		Pengembangan Kawasan Permukiman
			600.1.14.1	Perencanaan Teknis

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
			600.1.14.2	Kawasan Permukiman Perkotaan
			600.1.14.4	Kawasan Permukiman Khusus
			600.1.14.5	Kelembagaan
		600.1.15		Pembinaan Penataan Bangunan
			600.1.15.1	Perencanaan Teknis
			600.1.15.2	Penataan Bangunan Gedung
			600.1.15.3	Pengelolaan Rumah Negara
			600.1.15.4	Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus
			600.1.15.5	Kelembagaan
		600.1.16		Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			600.1.16.1	Perencanaan Teknis
			600.1.16.2	Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan
			600.1.16.4	Sistem Penyediaan Air Minum Khusus
			600.1.16.5	Kelembagaan
			600.1.16.6	Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
			600.1.16.7	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
		600.1.17		Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
			600.1.17.1	Perencanaan Teknis
			600.1.17.2	Pengelolaan Air Limbah
			600.1.17.3	Pengelolaan Persampahan
			600.1.17.4	Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus
			600.1.17.5	Kelembagaan
			600.1.17.6	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
		600.1.18		Pemantauan dan Evaluasi
600.2 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN				
			600.2.1	Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
			600.2.2	Perencanaan Pembiayaan Perumahan
			600.2.2.1	Keterpaduan Perencanaan
			600.2.2.2	Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan
			600.2.2.3	Kemitraan
			600.2.3	Pola Pembiayaan Perumahan
			600.2.3.1	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum
			600.2.3.2	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan
			600.2.3.3	Pola Investasi Perumahan
			600.2.4	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan
			600.2.4.1	Sumber Pembiayaan Primer
			600.2.4.2	Sumber Pembiayaan Sekunder
			600.2.4.3	Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya
			600.2.4.4	Sistem Pembiayaan Perumahan
			600.2.4.5	Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
			600.2.5	Perencanaan Penyediaan Perumahan
			600.2.5.1	Keterpaduan Perencanaan
			600.2.5.2	Analisa Teknik
			600.2.5.3	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian
			600.2.5.4	Kemitraan dan Kelembagaan
			600.2.6	Penyediaan Rumah Susun
			600.2.6.1	Perencanaan Teknik
			600.2.6.2	Penyediaan
			600.2.6.3	Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan
			600.2.6.4	Pengelolaan
			600.2.7	Penyediaan Rumah Khusus
			600.2.7.1	Perencanaan Teknik
			600.2.7.2	Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus
			600.2.7.3	Bimbingan teknis dan supervisi
			600.2.7.4	Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya
			600.2.7.5	Perencanaan Teknik
			600.2.7.6	Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni
			600.2.7.7	Pelaksanaan Bantuan Simultan
			600.2.8	Penyediaan Rumah Umum dan Komersial
			600.2.8.1	Perencanaan Teknik
			600.2.8.2	Pemberian Bantuan Rumah Umum
			600.2.8.3	Fasilitasi Hunian Berimbang
			600.2.8.4	Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan
			600.2.9	Investasi Infrastruktur
			600.2.9.1	Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur
			600.2.9.2	Sinkronisasi Investasi Infrastruktur
			600.2.9.3	Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur
			600.2.9.4	Pasar Infrastruktur
			600.2.10	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
			600.2.10.1	Sistem Penyelenggaraan
			600.2.10.2	Kontrak Konstruksi
			600.2.10.3	Konstruksi Berkelanjutan
			600.2.10.4	Manajemen Mutu
			600.2.11	Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
			600.2.11.1	Kelembagaan
			600.2.11.2	Material dan Peralatan Konstruksi

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
			600.2.11.3	Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri
			600.2.11.4	Usaha Jasa Konstruksi
		600.2.12		Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
			600.2.12.1	Standar dan Materi Kompetensi
			600.2.12.2	Penerapan Kompetensi
			600.2.12.3	Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi
			600.2.12.4	Pengembangan Produktivitas
		600.2.13		Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
			600.2.13.1	Peningkatan Kerjasama
			600.2.13.2	Pemberdayaan Jasa Konstruksi
		600.2.14		Peningkatan Jasa Konstruksi
			600.2.14.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja
			600.2.14.2	Pelaksanaan Pengendalian Mutu
		600.2.15		Penerapan Teknologi Konstruksi
			600.2.15.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi
			600.2.15.2	Pengembangan Materi
			600.2.15.3	Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi
		600.2.16		Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)
			600.2.16.1	Antar Sektor
			600.2.16.2	Antar Wilayah
		600.2.17		Pengembangan Kawasan Strategis
			600.2.17.1	Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis
			600.2.17.2	Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis
		600.2.18		Pengembangan Kawasan Perkotaan
			600.2.18.1	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan
			600.2.18.2	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru
			600.2.18.3	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan
			600.2.18.4	Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan
			600.2.18.5	Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)
		600.2.19		Pemantauan dan Evaluasi
600.3 TATA RUANG (TATA KOTA)				
			600.3.1	Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah
			600.3.2	Perencanaan
			600.3.2.1	Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)
			600.3.2.2	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
			600.3.2.3	Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten
			600.3.2.4	Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)
			600.3.2.5	Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kota
			600.3.2.6	Rencana Teknis Prasarana Kota
			600.3.2.7	Rencana Teknis Rencana Peremajaan dan Pengembangan Prasarana Kota
			600.3.3	Pemanfaatan dan Pengendalian
			600.3.3.1	Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang
			600.3.3.2	Ijin Pemanfaatan Ruang
			600.3.3.3	Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang
			600.3.4	Pemetaan
			600.3.4.1	Peta Dasar
			600.3.4.2	Survey Pemetaan Ruang Darat
			600.3.4.3	Survey Pemetaan Ruang Air
			600.3.4.4	Survey Pemetaan Ruang Udara
600.4 LINGKUNGAN HIDUP				
			600.4.1	Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
			600.4.2	Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
			600.4.2.1	Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan
			600.4.2.2	Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
			600.4.3	Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor
			600.4.3.1	Evaluasi Penerapan
			600.4.3.2	Perencanaan Lingkungan Hidup
			600.4.4	Ekonomi Lingkungan
			600.4.5	Dampak Lingkungan
			600.4.5.1	Bimtek Dampak Lingkungan
			600.4.5.2	Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan
			600.4.5.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut
			600.4.6	Pemantauan dan Pengawasan
			600.4.6.1	Manufaktur Prasarana dan Jasa
			600.4.6.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
			600.4.6.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
			600.4.6.4	Udara Sumber Bergerak
			600.4.7	Evaluasi dan Pengembangan
			600.4.7.1	Manufaktur, Prasarana dan Jasa
			600.4.7.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
			600.4.7.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
			600.4.7.4	Udara Sumber Bergerak
			600.4.8	Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan
			600.4.8.1	Pengembangan
			600.4.8.2	Pemanfaatan

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		600.4.8.3		Pengelolaan Sumber Daya Genetik
		600.4.8.4		Keamanan Hayati
		600.4.8.5		Pengendalian kerusakan Lahan
	600.4.9			Kerusakan Ekosistem Perairan Darat
		600.4.9.1		Kerusakan Ekosistem
		600.4.9.2		Rawa
	600.4.10			Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer
		600.4.10.1		Perangkat mitigasi
		600.4.10.2		Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
		600.4.10.3		Pengendalian Bahan Perusak Ozon
		600.4.10.4		Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan
	600.4.11			Adaptasi Perubahan Iklim
		600.4.11.1		Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim (antara lain: Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan
		600.4.11.2		Kerentanan Perubahan Iklim
	600.4.12			Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
		600.4.12.1		Registrasi dan Notifikasi
		600.4.12.2		Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun
		600.4.12.3		Evaluasi dan Tindak Lanjut
	600.4.13			Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun
		600.4.13.1		Pengumpulan dan pemanfaatan
		600.4.13.2		Pengangkutan dan Pengolahan
		600.4.13.3		Penimbunan dan Dumping
		600.4.13.4		Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas
	600.4.14			Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3
		600.4.14.1		Pemantauan
		600.4.14.2		Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi
	600.4.15			Pengelolaan Sampah
		600.4.15.1		Pembatasan sampah
		600.4.15.2		Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah
		600.4.15.3		Pembentukan Dewan Adipura
		600.4.15.4		Penetapan pemenang adipura
	600.4.16			Hukum Administrasi Lingkungan
		600.4.16.1		Pengelolaan dan pengembangan pengaduan
		600.4.16.2		Penataan hukum administrasi lingkungan
	600.4.17			Penyelesaian Sengketa Lingkungan
		600.4.17.1		Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan
		600.4.17.2		Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan
	600.4.18			Penegakan hukum pidana lingkungan
		600.4.18.1		Penyidikan
		600.4.18.2		Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut
		600.4.18.3		Koordinasi pembinaan penyidik PNS
	600.4.19			Komunikasi Lingkungan
		600.4.19.1		Pengembangan Komunikasi
		600.4.19.2		Publikasi dan Kampanye
	600.4.20			Penguatan Inisiatif Masyarakat
		600.4.20.1		Komunitas Pendidikan Lingkungan
		600.4.20.2		Kearifan Lingkungan
	600.4.21			Peningkatan Peran Masyarakat
		600.4.21.1		Masyarakat Perkotaan
	600.4.22			Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan
		600.4.22.1		Organisasi Sosial Masyarakat
		600.4.22.2		Organisasi Profesi Dunia Usaha
	600.4.23			Data dan Informasi Lingkungan
		600.4.23.1		Pengelolaan Data
		600.4.23.2		Pengelolaan Informasi
		600.4.23.3		Pengembangan Perangkat Lunak
		600.4.23.4		Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan
	600.4.24			Kelembagaan Lingkungan
		600.4.24.1		Kelembagaan dan Tata Laksana
		600.4.24.2		Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal
	600.4.25			Standarisasi dan teknologi
		600.4.25.1		Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan
		600.4.25.2		Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan
		600.4.25.3		Teknologi Ramah Lingkungan
	600.4.26			Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan
		600.4.26.1		Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan
		600.4.26.2		Laboratorium Rujukan dan Pengujian
700 PENGAWASAN				
700.1 PENGAWASAN INTERNAL				
	700.1.1			Rencana Pengawasan
		700.1.1.1		Rencana Strategis Pengawasan
		700.1.1.2		Rencana Kerja Pengawas Tahunan
		700.1.1.3		Rencana Kinerja Tahunan
		700.1.1.4		Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan
		700.1.1.5		Rakor Pengawasan Tingkat Daerah
	700.1.2			Pelaksanaan Pengawasan

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
			700.1.2.1	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan
			700.1.2.2	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK)
			700.1.2.3	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK)
			700.1.2.4	Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat
			700.1.2.5	Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan
			700.1.2.6	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara
			700.1.2.7	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
			700.1.2.8	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review
			700.1.2.9	Good Corporate Governance (GCG)
800 KEPEGAWAIAN				
800.1 SUMBER DAYA MANUSIA				
			800.1.1	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
			800.1.1.1	Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (antara lain: Bahan penyusunan rencana
			800.1.1.2	Perencanaan Pertimbangan Formasi (antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN,
			800.1.1.3	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
			800.1.1.4	Standarisasi Jabatan (antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan)
			800.1.2	Formasi dan Pengadaan Pegawai
			800.1.2.1	Formasi ASN (antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan
			800.1.2.2	Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN (antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan
			800.1.2.3	Pengumuman Kelulusan ASN
			800.1.2.4	Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima
			800.1.2.5	Pengangkatan ASN
			800.1.2.6	Open Bidding (Seleksi Terbuka Jabatan)
			800.1.2.7	Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN
			800.1.2.8	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN
			800.1.3	Mutasi Pegawai
			800.1.3.1	Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan,
			800.1.3.2	Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan
			800.1.3.3	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional
			800.1.3.4	Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai
			800.1.3.5	Peninjauan Masa Kerja
			800.1.3.6	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)
			800.1.4	Pengembangan Karir
			800.1.4.1	Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di
			800.1.4.2	Penyesuaian ijazah
			800.1.4.3	Penyusunan Sistem Karier
			800.1.4.4	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja
			800.1.4.5	Angka Kredit (antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul
			800.1.5	Kinerja Aparatur Sipil Negara
			800.1.5.1	Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja
			800.1.5.2	Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja
			800.1.5.3	Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja
			800.1.6	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
			800.1.6.1	Kode Etik Pegawai
			800.1.6.2	Disiplin
			800.1.6.3	Pemberhentian Dengan Hormat
			800.1.6.4	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
			800.1.6.5	Pemberhentian Sementara
			800.1.6.6	Pensiun ASN (antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan
			800.1.7	Bantuan Hukum
			800.1.8	Status dan Kedudukan Pegawai
				1 Status Kepegawaian
				2 Kedudukan Kepegawaian
				3 Keberatan Pegawai
				4 Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
			800.1.9	Sistem Informasi Kepegawaian
			800.1.9.1	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
			800.1.9.2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
			800.1.9.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik
			800.1.9.4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik
			800.1.10	Pengawasan dan pengendalian
			800.1.10.1	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat
			800.1.10.2	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan
			800.1.10.3	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja
			800.1.10.4	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
			800.1.10.5	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
			800.1.10.6	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer
			800.1.11	Administrasi Pegawai
			800.1.11.1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
			800.1.11.2	Cuti Sakit
			800.1.11.3	Cuti Bersalin
			800.1.11.4	Cuti Tahunan
			800.1.11.5	Cuti Alasan Penting
			800.1.11.6	Cuti Besar
			800.1.11.7	Cuti Di luar Tanggungan Negara
			800.1.11.8	Karpeg/KPE/Karis/Karsu

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
			800.1.11.9	Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan
			800.1.11.10	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)
			800.1.11.11	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
			800.1.11.12	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
			800.1.11.13	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan
		800.1.12		Kesejahteraan Pegawai
			800.1.12.1	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
			800.1.12.2	Asuransi Pegawai/BPJS
			800.1.12.3	Tabungan Perumahan
			800.1.12.4	Bantuan Sosial
			800.1.12.5	Pakaian Dinas
			800.1.12.6	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas
			800.1.12.7	Pemberian Tali Kasih
			800.1.12.8	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
			800.1.12.9	Olahraga dan Rekreasi
			800.1.12.10	Rekam Medis
		800.1.13		Administrasi Perseorangan
			800.1.13.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
			800.1.13.2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
			800.1.13.3	Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan
			800.1.13.4	Sekretaris Daerah
			800.1.13.5	ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional
		800.1.14		Penilaian Kompetensi
			800.1.14.1	Penilaian Kompetensi
			800.1.14.2	Hasil Penilaian Kompetensi
800.2 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
		800.2.1		Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah
		800.2.2		Pendidikan dan Pelatihan
			800.2.2.1	Sistem Informasi program dan pembinaan diklat
			800.2.2.2	Pedoman-pedoman kediklatan
			800.2.2.3	Kurikulum-kurikulum diklat
			800.2.2.4	Modul-modul diklat
			800.2.2.5	Panduan fasilitator
			800.2.2.6	Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat
			800.2.2.7	Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat
			800.2.2.8	Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat
			800.2.2.9	Konsultasi, advokasi, asistensi diklat
		800.2.3		Widyaiswara
			800.2.3.1	Seleksi dan pengembangan Widyaiswara
			800.2.3.2	Sertifikasi Widyaiswara
			800.2.3.3	Monitoring dan evaluasi Widyaiswara
			800.2.3.4	Penilaian Widyaiswara
			800.2.3.5	Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara
			800.2.3.6	Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara
		800.2.4		Penyelenggaraan Diklat
			800.2.4.1	Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat
			800.2.4.2	Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat
			800.2.4.3	Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat
			800.2.4.4	Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran
			800.2.4.5	Sistem informasi diklat
			800.2.4.6	Monitoring Penyelenggara Diklat
			800.2.4.7	Monitoring dan evaluasi Pasca diklat
		800.2.5		Alumni
900 KEUANGAN				
900.1 KEUANGAN DAERAH				
		900.1.1		Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
			900.1.1.1	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)
			900.1.1.2	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)
			900.1.1.3	Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
			900.1.1.4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)
		900.1.2		Penyusunan Anggaran
			900.1.2.1	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan
			900.1.2.2	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota
			900.1.2.3	Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris
			900.1.2.4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola
		900.1.3		Pelaksanaan Anggaran
			900.1.3.1	Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS
			900.1.3.2	Pendapatan
			900.1.3.3	Belanja
			900.1.3.4	Pembiayaan Daerah
			900.1.3.5	Dokumen Penatausahaan Keuangan
			900.1.3.6	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
			900.1.3.7	Daftar Gaji
			900.1.3.8	Kartu Gaji
			900.1.3.9	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
			900.1.3.10	Laporan Keuangan
		900.1.4		Pinjaman/Hibah Luar Negeri
			900.1.4.1	Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)
			900.1.4.2	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)
			900.1.4.3	Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya
			900.1.4.4	Dokumen Loan Agreement (PHLN) (antara lain: Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat)
			900.1.4.5	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri (antara lain: usulan luncuran dana)
			900.1.4.6	Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya
			900.1.4.7	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)
			900.1.4.8	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri (antara lain: Surat Perintah Pencairan)
			900.1.4.9	Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) antara lain : No Objection
			900.1.4.10	Staff Appraisal Report
			900.1.4.11	Report /Laporan
			900.1.4.12	Laporan Hutang Daerah
			900.1.4.13	Completion Report/Annual Report
			900.1.4.14	Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri
		900.1.5		Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)
		900.1.6		Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
			900.1.6.1	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
			900.1.6.2	Dokumen Kebijakan Akuntansi
			900.1.6.3	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi
			900.1.6.4	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran
		900.1.7		Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan
			900.1.7.1	Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran
			900.1.7.2	Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya :(antara lain: SPP-SPP-Daftar Perincian
			900.1.7.3	Buku Rekening Bank
			900.1.7.4	Keputusan Pembukuan Rekening
			900.1.7.5	Pembukuan anggaran terdiri :(antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register
		900.1.8		Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan
			900.1.8.1	Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau
			900.1.8.2	Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPh dan Denda Keterlambatan
		900.1.9		Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD (antara lain: Kebijakan Keuangan
		900.1.10		Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu
			900.1.10.1	Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda
			900.1.10.2	Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan
			900.1.10.3	Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat,
			900.1.10.4	Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk
		900.1.11		Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah
			900.1.11.1	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan
			900.1.11.2	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal
			900.1.11.3	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional
			900.1.11.4	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah
		900.1.12		Anggaran Daerah
			900.1.12.1	Anggaran Daerah
			900.1.12.2	Dukungan Teknis Anggaran Daerah
		900.1.13		Pendapatan dan Investasi Daerah
			900.1.13.1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (antara lain: Fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi
			900.1.13.2	Badan Usaha Milik Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik
			900.1.13.3	Badan Layanan Umum Daerah (antara lain: Analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta
			900.1.13.4	Pengelolaan Kekayaan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan
			900.1.13.5	Pinjam Dan Obligasi Daerah (antara lain: Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah
		900.1.14		Fasilitasi Dana Perimbangan
			900.1.14.1	Fasilitasi Dana Alokasi Umum (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan
			900.1.14.2	Fasilitasi Dana Alokasi Khusus (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar. Sosialisasi dan
			900.1.14.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar
			900.1.14.4	Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya (antara lain: Sosialisasi dan supervisi dana
			900.1.14.5	Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan (antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan
		900.1.15		Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
			900.1.15.1	Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan
			900.1.15.2	Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta
			900.1.15.3	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan
			900.1.15.4	Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli (antara lain: penyiapan bahan bantuan
			900.1.15.5	Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: penyiapan sinkronisasi



WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH